

Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis Hak dalam Fungsi-fungsi Legislatif: Manual Untuk Fasilitator

**Sebuah Pengalaman Pendidikan HAM
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)**



DEMOS

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia
Griya Upakara, Lantai 3 Unit 3.
Jl. Cikini IV No.10 Jakarta Pusat
Indonesia
Phone. 62-21-39899777 Fax. 62-21-3147897
E-mail: office@demos.or.id
Web-site: www.demosindonesia.org

Program ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari Kementrian Luar Negeri Norwegia.

Semua bagian dari manual ini boleh digandakan oleh segala organisasi non-pemerintah atau organisasi kemasyarakatan untuk digunakan dalam pendidikan hak asasi manusia dengan menyebutkan sumbernya dan menyampaikan pemberitahuan kepada Demos.

Pendapat yang diungkapkan dalam manual ini sepenuhnya tanggungjawab penyusun dan tidak mewakili pendapat atau posisi lembaga dana yang membantu perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program ini.

Kata Pengantar

Salah satu arti penting dari proses demokratisasi Aceh pasca UU Pemerintahan Aceh adalah bergesernya pendulum politik dari politik sentral ke politik lokal. Sentralisme kekuasaan yang selama tiga dasawarsa berpusat di Jakarta pudar oleh kebijakan desentralisasi. Politik lokal bukan lagi sesuatu yang dianggap tabu, seiring dengan desentralisasi distribusi kekuasaan politik yang mengakibatkan terbukanya dan terciptanya ruang-ruang politik lokal baru di Aceh. Secara legal, ruang-ruang politik lokal baru semakin dimungkinkan dengan dijaminnya pembentukan partai politik lokal [Bab XI pasal 75 tentang pembentukan partai politik lokal dalam UU Pemerintahan Aceh]. Bukan hanya itu, tapi juga nyata-nyata terlibat sebagai peserta Pemilihan Umum di tingkat lokal. Selain itu, kesepakatan damai yang dibangun di Helsinki mengharapkan bahwa pertikaian akan mereda dan dapat diubah menjadi kegiatan pembangunan bersama (melalui proses pemberian kompensasi, integrasi, dan proses rekonstruksi terpadu).

Pemilu 2009 merupakan pijakan penting bagi proses perdamaian dan kehidupan bersama di Aceh. Sebagai kerangka kerja politik, demokrasi cukup berkesinambungan dengan perdamaian. Ruang politik bagi terjadinya transformasi relasi-relasi kekuasaan semakin besar. Meski demikian, upaya-upaya perbaikan representasi politik masih perlu terus dilakukan. Dalam hal ini penting agar anggota-anggota legislatif memiliki kapasitas dalam menyusun dan menerapkan kebijakan politik yang sesuai dengan nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia. Kebutuhan ini semakin mendesak, menimbang sebagian besar anggota parlemen hasil Pemilu 2009 di Aceh adalah wajah-wajah baru. Mereka berada baik di DPR tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan kapasitas untuk menyusun kebijakan berperspektif HAM, para anggota legislatif tersebut diharapkan mampu menghadirkan HAM dalam produk regulasi yang akan berdampak pada penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak sipil, politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Kebutuhan faktual tersebut sejalan dengan apa yang dimandatkan MoU Helsinki pada butir 1.4.2 yang menyebutkan:

Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional PBB mengenai Hak – hak Sipil Politik dan mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pasal tersebut jelas memandatkan anggota legislatif Aceh untuk merumuskan dan menetapkan produk perundang-undangan Aceh yang berperspektif HAM, demi tercapainya cita-cita substantif yaitu: kebebasan, persamaan, keadilan dan kesejahteraan. Namun cita-cita ini akan menemukan ruang gelap tatkala pemahaman para legislator mengenai penerapan hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan publik masih lemah dan belum efektifnya kendali warga terhadap legislator.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemajuan dan perlindungan HAM, badan legislatif dan para anggota legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah, merupakan aktor yang sangat penting. Terlebih lagi jika mengingat peran legislatif secara keseluruhan berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan eksekutif mencakup keseluruhan spektrum hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal itu memberi pengaruh langsung bagi penikmatan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan urusan-urusan publik, maka tak dapat disangkal bahwa

parlemen adalah pengawal hak asasi manusia. Anggota parlemen selayaknya menyadari peran tersebut karena perdamaian dan kondisi politik, sosial, dan ekonomi bangsa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana hak asasi manusia dituangkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen. Anggota parlemen sepatutnya memahami Konstitusi sebagai penjaga hak asasi manusia, serta peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

DEMOS sebagai lembaga yang berkomitmen untuk mendorong proses demokrasi dan penguatan hak asasi manusia di Aceh sejak tahun 2005, dengan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Norwegia, melanjutkan program “Pemberdayaan Masyarakat Madani di Aceh untuk Mendukung Demokratisasi Setelah Kesepakatan Damai Helsinki” dalam bentuk Pemberdayaan dan Penguatan kapasitas untuk para Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Program ini dilaksanakan dalam bentuk serangkaian pelatihan HAM bagi anggota Legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan selama 2009 – 2010. Program penguatan kapasitas tersebut dilakukan dengan menggunakan modul pendidikan yang bersifat sistematis, partisipatoris dan didasarkan pada kebutuhan anggota legislatif dalam menyusun kebijakan yang berbasis hak asasi manusia.

Manual yang disusun bersama ini sudah digunakan untuk 10 kali pelatihan yang diselenggarakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tiga kali pelatihan dilakukan untuk anggota legislatif di tingkat provinsi dan 7 kali pelatihan untuk Anggota Legislatif di tingkat Kabupaten/Kota. Setelah itu diperbaharui oleh sebuah tim perumus untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemajuan HAM dan Demokrasi. Di masa depan DEMOS mengharapkan agar manual yang disusun ini juga dapat dimanfaatkan bagi upaya yang sama di wilayah lain di berbagai provinsi di Indonesia.

Jakarta, Desember 2010

Antonio Pradjasto
Direktur Eksekutif DEMOS

Ucapan Terima Kasih

DEMOS berhutang budi kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu dan keahliannya dalam menyusun panduan pelatihan ini. DEMOS mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra yang memberikan kontribusi dalam persiapan, penyusunan, penulisan, penerjemahan, ilustrasi, pencetakan dan penyebarluasan manual pelatihan ini.

Materi-materi di dalam manual pelatihan ini disusun oleh Tim Pengembangan Kurikulum yang terdiri dari: *Asmara Nababan, Antonio Pradjasto, Cahyo Suryanto, Afridal Darmi, Bustami Abubakar, Agung Wijaya, Yunus M. Yasin, Faisal Hadi, Zahri, Dahlan, Luki Pramita, Ingrid Silitonga*.

Manual ini ditulis oleh Tim Penyusun yang terdiri dari: *Atikah Nuraini, Indriaswari Dyah Saptaningrum, Roichatul Aswidah, Ronald Rofiandri, dan Herizal Efendi*. Manual ini dibaca dan dikritisi oleh: *Asmara Nababan, Antonio Pradjasto, Bustami Abubakar*.

Manual ini diperbaiki kembali pasca uji coba oleh: *Atikah Nuraini dan Afridal Darmi* dengan masukan-masukan dari *M.M. Billah, Asmara Nababan, Antonio Pradjasto, Khairani Arifin, Isnu Handono, Luki Pramita, Ingrid Silitonga*.

Program ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari Kementerian Luar Negeri Norwegia.

Daftar isi

Kata Pengantar	3
Ucapan terima kasih	5
Daftar Isi	7
Titik Berangkat bagi Fasilitator dan Penyelenggara	9
1. Bagaimana Mempersiapkan Pelatihan Ini	9
2. Bagaimana Menggunakan Manual Ini	25
Pembukaan, Perkenalan, dan Orientasi belajar	27
Modul 1 Pentingnya Meningkatkan pemahaman dan kesadaran HAM bagi anggota Legislatif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	41
• Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia	43
• Memahami Kewajiban Negara dalam Hak Asasi Manusia	45
• Analisa Situasi HAM di Provinsi NAD	47
Modul 2 Mengintegrasikan Pendekatan berbasis Hak dalam fungsi-fungsi Legislatif	61
• Mengenal Pendekatan berbasis hak dalam menyusun kebijakan	64
• Penerapan Fungsi Legislasi berbasis HAM	67
• Penerapan Fungsi Penganggaran berbasis HAM	68
• Penerapan Fungsi Pengawasan berbasis HAM	69
Evaluasi dan Penutup	86
Tentang Demos	93

Titik Berangkat bagi Fasilitator dan Penyelenggara

Bagaimana Mempersiapkan Pelatihan ini

Menyiapkan pelatihan secara cermat adalah satu langkah penting bagi berhasil tidaknya suatu pelatihan. Boleh dibilang, dengan rapinya persiapan maka hampir separuh dari keberhasilan semestinya dapat diraih. Dalam mempersiapkan pelatihan bagi para anggota legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maupun di wilayah-wilayah lainnya, terdapat sejumlah pertimbangan dan persiapan yang hendaknya dapat diperhatikan oleh fasilitator dan penyelenggara.

Menetapkan Tujuan

Target yang ingin dicapai dari program pendidikan ini adalah untuk meningkatnya kapasitas Anggota Legislatif, baik dari kalangan Partai-partai Nasional maupun partai lokal, di tingkat DPRA (DPRD Tingkat I) maupun DPRK (DPRD Tingkat II), terutama untuk mengintegrasikan HAM dalam pelaksanaan Fungsi-fungsi Legislatif.

Tujuan dilaksanakannya pelatihan HAM bagi Anggota Legislatif ini adalah:

1. Meningkatnya kesadaran para anggota legislatif tentang hak asasi manusia dan peran mereka sebagai pemangku kewajiban dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia
2. Meningkatnya kemampuan para anggota legislatif mengenai bagaimana mengintegrasikan HAM dalam Fungsi-fungsi Legislatif

Identifikasi Peserta dan Kebutuhannya

Pendidikan ini ditujukan bagi peserta dari kalangan Anggota DPRD Tingkat I (DPRA) dan II (DPRK) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selama 10 kali putaran, lebih kurang 69 Anggota Legislatif dari DPRA dan 200 anggota Legislatif dari DPRK telah mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan. Para peserta adalah Anggota Dewan, baik yang berasal dari Partai Nasional maupun Partai Lokal.

Penyelenggara kegiatan memperhatikan keseimbangan gender di antara peserta, serta memastikan kepesertaan dalam pendidikan ini secara aktif dengan membedah kebijakan publik yang bersumber dari persoalan-persoalan yang muncul dari peserta.

Prakondisi: Asesmen Awal Pelatihan

Untuk membuat pelatihan seperti ini menjadi lebih berhasil guna, maka pelatih dan penyelenggara perlu terlebih dahulu memahami:

1. Konteks sosial budaya dan politik, misalnya struktur patrimonialisme, budaya patronase sosial politik, sejarah ketegangan antara kelompok ulama dengan priyayi, dan sebagainya. Dengan bekal pemahaman ini, fasilitator dan penyelenggara memiliki bahan untuk memahami perilaku peserta dengan lebih baik pula. Sehingga dapat mengantisipasi perilaku itu dari awal.
2. Mengetahui tingkat kesetaraan pengetahuan, sikap dan perilaku peserta. Informasi ini akan sangat bermanfaat untuk mencegah terhimpunnya peserta didik dengan pengetahuan dan

derajat yang terlalu bervariasi. Karena jika variasi derajat pengetahuan ini terlalu jauh, maka akan sangat mempengaruhi tingkat keterlibatan peserta, akan ada yang terlalu dominan dan akan ada yang pasif, serta lebih banyak waktu yang tidak efisien karena harus menjelaskan kembali konsep-konsep dasar, misalnya.

3. Menentukan secara jelas tujuan pelatihan sekaligus menetapkan parameter dan indikator capaian tujuan itu.

Merujuk pada pengalaman menerapkan alur belajar dan spiral belajar ini pada seri pelatihan pertama ditemukan beberapa hal sebagai berikut¹ :

Perbandingan Pra-anggapan Teoritikal dan Realitas Empirikal

No	Anasir Pembelajaran	Pra-anggapan Teoritikal	Realitas Empirikal
1	Konsep tentang pembelajar	Secara umum orang dewasa memiliki kebutuhan psikologis untuk mengarahkan dirinya sendiri	Diragukan ada 'kebutuhan' untuk mengarahkan-diri-sendiri (tekanan struktural dari sistem partai, sistem patronase & patrimonialisme)
2	Peran pembelajar	Mengangkat/menggunakan alat-alat pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman sendiri ➤ teknik eksperiensial: percobaan laborator, diskusi, kasus pemecahan masalah, latihan simulasi, pengalaman lapangan	Ada keinginan belajar dari pengalaman sendiri; tetapi juga ada ke henda kuat utk menerima pengetahuan dari pakar (nara sumber) yang handal ➤ tradisi ketergantungan (hubungan patronase)
3	Kesiapan untuk belajar	Orang siap belajar ketika memiliki kebutuhan untuk mempelajarinya guna menghadapi tugas atau masalah yang nyata ➤ penyediaan alat & tatacara membantu menemukan kebutuhan untuk tahu	Diragukan ada kebutuhan mempelajari HAM & Pemaduan HAM dengan Fungsi legislatif
4	Kiblat Pembelajaran	Peningkatan kompetensi untuk mengembangkan potensi kehidupan	Dalam rancangan ada kiblat peningkatan kompetensi; tetapi diragu-kan peserta memegang kuat kiblat peningkatan kompetensi ➤ (tekanan struktural dari sistem partai, sistem patronase & patri-monialisme, masa kerja)

¹ Knowles, Malcolm S., *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy* (revised and updated), Chicago, Follett Publishing Company, 1980:40-59], dikutip dari M.M. Billah *Catatan Lepas atas Materi dan Proses Pelatihan 'Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM dalam Fungsi-fungsi Legislatif' disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Modul 'Pelatihan Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota', Hotel Santika, Bumi Serpong Damai, Tangerang, 18 September 2010.*

Oleh karena itu adalah penting bagi fasilitator dan penyelenggara untuk mempersiapkan diri dan terus mengasah keterampilan untuk mengenali dan mengantisipasi ketimpangan antara asumsi ini dengan pengalaman empirikal dalam fasilitasi pelatihan nantinya

Merumuskan Substansi dan Metode Pelatihan

Perumusan substansi pelatihan ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari staf Demos dan wakil-wakil dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik di Aceh. Dalam diskusi perumusan tersebut disepakati bahwa titik berat muatan pelatihan ini adalah adanya peningkatan pemahaman mengenai konsep dasar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bagaimana mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam fungsi-fungsi legislatif. Untuk memenuhi tujuan tersebut kurikulum ini menekankan pada pentingnya memahami peran anggota legislatif sebagai bagian dari pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya.

Manual Pertama untuk pelatihan ini disusun dalam 10 modul yang masing-masing modul membahas satu topik bahasan terkait dengan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Tantangan dan Peluang HAM di dalam konteks sosial politik Aceh, Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Budaya Aceh, Hak Asasi Manusia dalam sistem hukum domestik, serta topik-topik khusus mengenai bagaimana mengintegrasikan hak asasi manusia dalam fungsi-fungsi legislatif (Legislasi, Budgeting, dan Pengawasan).

Berdasarkan hasil ujicoba dilakukan sejumlah revisi untuk menyederhanakan materi-materi tersebut. Dalam diskusi revisi manual yang dilakukan oleh tim penyusun manual bersama tim fasilitator disepakati bahwa muatan substansi yang diperlukan disederhanakan menjadi 2 modul yaitu:

Modul 1: Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran HAM

- Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Hak asasi Manusia
- Tantangan dan Peluang HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Hak Asasi Manusia dalam Hukum Domestik

Modul 2: Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis Hak dalam Fungsi-fungsi Legislatif

- Mengenal Pendekatan Berbasis HAM dalam Penyusunan kebijakan
- Penerapan Fungsi Legislasi berbasis HAM
- Penerapan Fungsi Penganggaran berbasis HAM
- Penerapan Fungsi Pengawasan berbasis HAM

Untuk memperkuat pemahaman fasilitator mengenai konteks lokal Aceh dan karakter peserta pelatihan yang terdiri dari kalangan anggota legislatif, maka disediakan pula Bab Khusus mengenai bagaimana mempersiapkan pelatihan ini dan bagaimana menggunakan manual ini. Bab ini disusun dengan harapan para fasilitator akan mendapatkan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi ketika berhadapan dengan peserta sekaligus juga pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

Pendidikan ini menggunakan metode partisipatif. Dengan metode ini maka diharapkan terbuka peluang bagi semua orang yang terlibat dalam proses pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan belajar satu sama lain. Dalam proses pembelajarannya, pelatihan partisipatif ini tidak mengandaikan adanya guru dan murid, yang mengajar dan yang diajar.

Pelatihan partisipatif muncul sebagai kritik terhadap pelatihan tradisional. Pelatihan tradisional berpendirian bahwa pengetahuan ditransfer dari guru pada murid.

Dalam pelatihan tradisional, guru ditempatkan sebagai subyek aktif, sedangkan murid sebagai obyek pasif. Pelatihan (pendidikan) direduksi menjadi (sekedar) pemberian informasi oleh guru yang harus ditelan, diingat, dan dihafalkan oleh murid. Model komunikasi guru–murid berlangsung searah dan keterlibatan murid dalam komunikasi hanya sebagai pendengar pasif. Walaupun muncul pertanyaan, hanya pertanyaan yang bersifat klarifikasi atau afirmasi (penegasan); sangat kecil kemungkinannya untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat menggugat.

Pelatihan partisipatif mencoba untuk menjauhkan—bahkan menolak—hubungan yang timpang antara guru dan murid. Model ini menerapkan hubungan yang setara antara semua orang yang terlibat dalam proses belajar, yaitu peserta dan fasilitator pelatihan. Berbeda dengan guru, fasilitator bukan satu-satunya orang yang menguasai pengetahuan. Fasilitator lebih berperan sebagai katalisator dan moderator yang memungkinkan proses komunikasi berlangsung ke semua arah (bukan cuma dua arah), baik di antara sesama peserta maupun antara peserta dengan fasilitator. Hal yang dikomunikasikan lebih pada pengungkapan pengalaman dan pengetahuan peserta pelatihan sendiri. Fasilitator juga membantu menemukan kekuatan dan kelemahan yang tersimpan di masing-masing peserta. Dengan demikian, fasilitator turut terlibat dalam belajar bersama, bukan lagi sebagai sosok guru otoriter yang maha tahu atau narasumber yang menguasai materi, namun menjadi pendorong bagi peserta untuk mencari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru.

Selain itu, dalam pelatihan partisipatif, subyek adalah mereka yang belajar, yakni fasilitator dan peserta. Peserta adalah pemilik sah dari dirinya sendiri, baik yang berupa pemikiran, bakat, ataupun keahlian yang semuanya harus diberi ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, fasilitator hanya mengarahkan agar peserta mampu menemukan cara-cara baru dalam mengatasi masalah yang muncul selama pelatihan, serta mengembangkan komitmen, cara pandang, kemampuan, dan kepercayaan diri mereka.

Pendekatan Andragogi

Istilah lain yang kerap dihubungkan dengan pelatihan partisipatif adalah pendidikan bagi orang dewasa, yakni andragogi. Pendekatan andragogi yang diperkenalkan oleh Malcolm Knowles, beranggapan bahwa orang dewasa mempunyai banyak pengalaman yang beragam dalam hidupnya. Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno “*aner*”, dengan akar kata [andr-] yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan “*agogos*” yang berarti membimbing atau membina. Pendekatan ini kerap disandingkan dengan pendekatan pedagogi, yang ditarik dari kata “*paid*” artinya anak dan “*agogos*” artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian secara harafiah “pedagogi” berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak.

Pada awalnya, bahkan hingga sekarang, banyak praktik proses belajar dalam suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya bersifat andragogis, dilakukan dengan cara-cara pedagogis. Prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat diberlakukan bagi kegiatan pelatihan orang dewasa. Padahal orang dewasa sebagai individu dipandang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, proses interaksi belajar yang diperlukan adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri seperti yang ditemukan dalam model andragogi.

Asumsi-Asumsi Pokok Pendekatan Andragogi

Menurut Malcolm Knowles, terdapat empat asumsi pokok dalam pendekatan Andragogi:

1. *Konsep Diri*

Asumsinya bahwa kesungguhan dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu mandiri dan mengarahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, secara umum, konsep diri anak-anak masih tergantung; sementara pada orang dewasa, konsep dirinya sudah mandiri. Oleh karena kemandiriannya inilah orang dewasa butuh memperoleh penghargaan dari orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan (*self determination*) dan mengarahkan dirinya (*self direction*). Apabila orang dewasa tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan atas dirinya sendiri, maka akan timbul penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis untuk mandiri, meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang bersifat sementara.

2. *Peran Pengalaman*

Asumsinya adalah setiap individu membutuhkan proses untuk tumbuh dan berkembang menuju kematangan. Dalam perjalanannya, individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman hidup. Hal ini menjadikannya sebagai sumber belajar yang kaya, dan pada saat yang bersamaan memberikan dasar untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam pelatihan atau pembelajaran orang dewasa terjadi penurunan penggunaan teknik *transmital* seperti yang digunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman, atau yang dikenal dengan "*experiential learning cycle*" (proses belajar berdasarkan pengalaman). Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode serta teknik pelatihan, yang antara lain lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laboratorium, kunjungan lapangan, dan melakukan latihan-latihan.

3. *Kesiapan Belajar*

Asumsinya bahwa semakin matang individu, maka kesiapan belajarnya bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh beban tugas dan peran sosialnya. Hal ini membawa implikasi terhadap pilihan materi belajar dan metode yang digunakan dalam pelatihan, yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

4. *Orientasi Belajar*

Pada anak, orientasi belajarnya berpusat pada materi pembelajaran (*subject matter centered orientation*), sedangkan pada orang dewasa, orientasi belajarnya berpusat pada pemecahan masalah yang dihadapi (*problem centered orientation*). Bagi orang dewasa, proses belajar merupakan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkaitan dengan fungsi dan peranan sosialnya. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap materi belajar yang hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan.

Suasana Belajar Pelatihan Partisipatif

Suasana pelatihan menentukan berhasil tidaknya proses pelatihan. Beberapa hal yang perlu dibangun dalam proses pelatihan partisipatif adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif yang merata dari semua peserta

Proses belajar pada orang dewasa mensyaratkan partisipasi aktif dari semua peserta. Peserta harus mendapat kesempatan untuk memperhatikan, mendengarkan, berbicara, dan melakukan. Jika terdapat peserta yang mengalami kesulitan untuk terlibat dalam proses tersebut, adalah tugas fasilitator untuk membantunya.

2. Suasana yang saling menghargai

Seseorang dapat belajar dengan lebih baik dalam suasana yang aman, saling mempercayai dan menghargai semua pendapat. Kegagalan membangun kepercayaan akan menimbulkan saling kecurigaan yang akan membuat proses belajar tidak optimal.

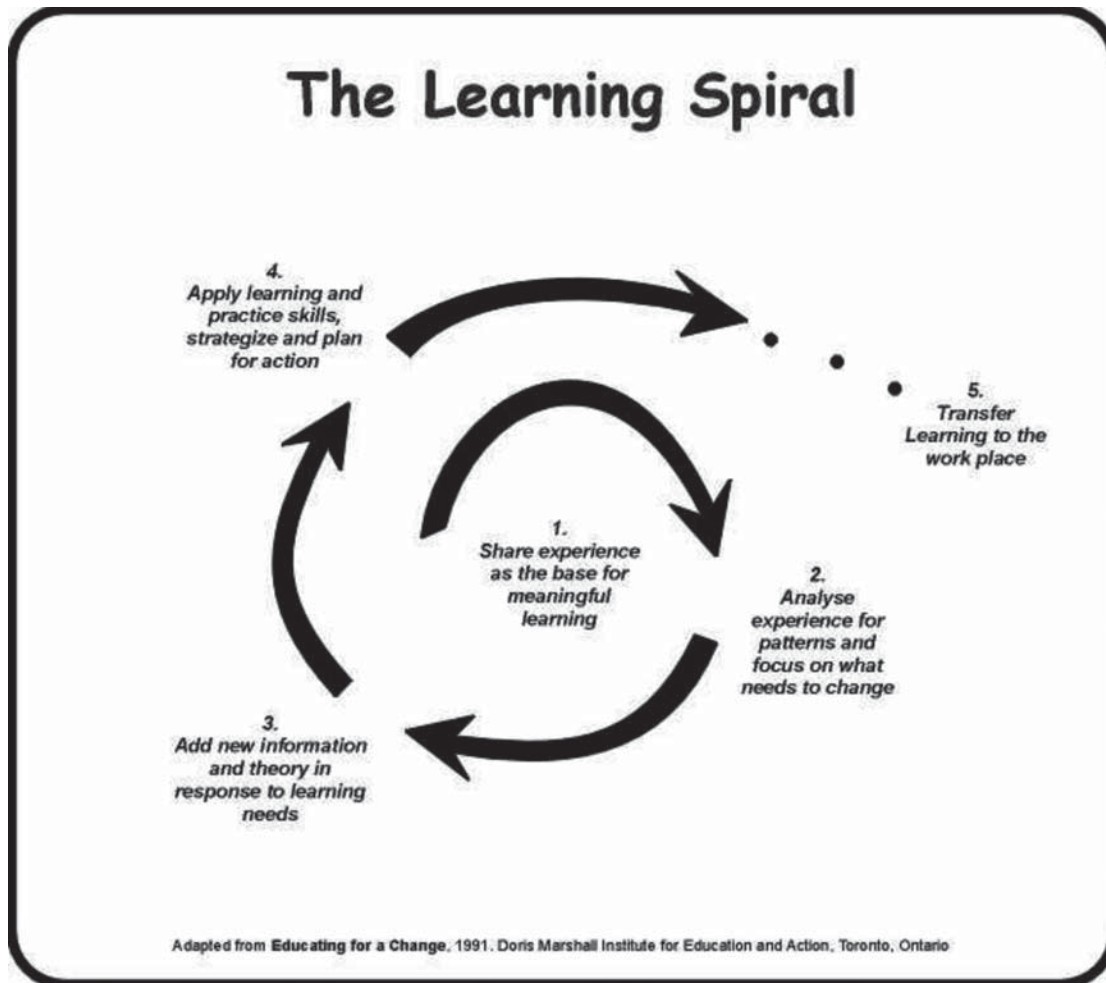
3. Suasana serius tapi santai

Ketegangan yang berlebihan harus bisa dihindari dalam proses belajar. Seandainya ketegangan terjadi, fasilitator hendaknya segera mencairkan suasana. Suasana belajar yang serius tetapi santai, akan lebih membuka cakrawala belajar.

Spiral Belajar

Kurikulum pendidikan ini disusun dengan menggunakan pendekatan spiral belajar. Pendekatan ini digunakan untuk sebanyak mungkin menggunakan pengalaman peserta sebagai landasan dan bahan belajar. Metode ini diadaptasi dari *“Educating for Change”* [1991]. Berikut ini adalah bagaimana spiral belajar dirumuskan dalam metode pelatihan:

1. **Mulai dengan pengalaman peserta.** Proses belajar dimulai dari pengalaman dan pengetahuan peserta.
2. **Mencari pola.** Setelah peserta membagi pengalaman mereka, mereka menganalisis pengalaman tersebut dan mencari pola-polanya (misalnya, apa persamaannya? Seperti apa polanya?).
3. **Menambahkan informasi dan teori baru.** Guna memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta, informasi dan teori baru yang diperoleh dari para pakar serta ide-ide baru yang diperoleh secara kolektif, ditambahkan.
4. **Mempraktikkan strategi dan rencana aksi baru.** Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari – mempraktikkan keahlian baru, mengembangkan strategi, serta membangun rencana aksi.
5. **Melakukan aksi.** Setelahnya (biasanya ketika mereka kembali pada pekerjaan rutinnnya) mereka mengaplikasikan hal-hal yang telah mereka pelajari.



Peran Fasilitator

Dalam pelatihan partisipatif, tugas fasilitator adalah mempersiapkan perangkat atau prosedur untuk mendorong dan melibatkan seluruh peserta secara aktif. Berbagai perangkat dalam proses partisipatif melibatkan elemen-elemen antara lain sebagai berikut:

- Menyusun kurikulum dan alur belajar sesuai dengan tujuan pelatihan dan kebutuhan peserta
- Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan belajar bagi peserta, fasilitator, dan narasumber;
- Merumuskan tujuan-tujuan kegiatan agar memenuhi kebutuhan peserta;
- Merencanakan pola pengalaman belajar;
- Melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metoda dan teknik yang memadai;
- Menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri;
- Mengevaluasi hasil belajar dan mengidentifikasi kembali kebutuhan-kebutuhan belajar.

Berdasarkan identifikasi kerja tersebut, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelatihan sebenarnya sudah dimulai sebelum pelatihan itu sendiri berlangsung. Seorang fasilitator perlu memiliki keterampilan yang memadai, baik pada saat persiapan maupun berlangsungnya pelatihan. Pada saat persiapan, keterampilan yang dibutuhkan fasilitator adalah merencanakan dan mempersiapkan pelatihan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah sebagai berikut:

- Mengetahui latar belakang peserta pelatihan;
- Menetapkan strategi pelatihan dan pilihan media yang tepat;
- Merencanakan dan mempersiapkan bahan-bahan fasilitasi;
- Menyusun langkah-langkah fasilitasi secara berturutan;
- Memeriksa semua perlengkapan pelatihan;

Pada saat pelatihan berlangsung, keterampilan yang perlu dikuasai oleh seorang fasilitator antara lain adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pengantar dan uraian tugas

Untuk masuk ke sesi materi ini, fasilitator memberikan pengantar (briefing) tentang latar belakang materi dan tujuan sesi, serta uraian tugas singkat. Dengan demikian, peserta akan mengetahui apa yang sedang dan akan berlangsung, peran apa yang dituntut dari peserta dan mengapa peserta diminta untuk berpartisipasi. Fasilitator memberikan informasi agar peserta mengetahui apa yang perlu dilakukan. Informasi yang perlu disampaikan kepada para peserta adalah:

- Pengantar mengenai pentingnya mata acara tersebut dan hasil yang hendak dicapai;
- Langkah-langkah fasilitasi secara keseluruhan;
- Penjelasan tentang tugas-tugas yang perlu dilakukan peserta.

Fasilitator memberi kesempatan tanya-jawab singkat untuk menjaga kemungkinan peserta kurang menangkap penjelasan fasilitator.

b. Memantau

Untuk memastikan bahwa peserta tidak kehilangan arah dan memperoleh manfaat dari keseluruhan proses pelatihan, fasilitator perlu mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk memberikan umpan balik. Amati dengan cermat seluruh kegiatan yang berlangsung dan buatlah catatan-catatan ringkas. Sambil mengamati, fasilitator dapat memberi masukan untuk membantu proses belajar. Namun, jangan terlalu banyak campur tangan dalam proses belajar, biarkan para peserta menemukan jawaban atau mencapai tujuan belajar secara mandiri. Ada dua cara untuk mengamati kegiatan pelatihan:

- Pendekatan berdasarkan isi, yakni dengan mengamati apa yang dikerjakan oleh peserta. Pengamatan berdasarkan isi akan berguna untuk sesi materi pelatihan yang bertujuan mengantarkan pemahaman ke suatu jawaban yang benar;
- Pendekatan berdasarkan proses, yakni mengamati hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana suatu aktivitas dilakukan, atau apa yang terjadi di balik sebuah aktivitas.

c. Membingkai, mengkaji ulang, dan meletakkan pada konteks

Setelah tugas-tugas dilakukan, fasilitator hendaknya melakukan kaji ulang terhadap proses yang sudah dilakukan. Kegiatan kaji ulang merupakan kegiatan diskusi yang ditujukan untuk menarik pelajaran-pelajaran berharga dari proses yang telah berlangsung, yang diperlukan untuk memberikan penekanan pada pokok-pokok pelajaran yang didapat dan kemungkinan-kemungkinan penerapannya dalam situasi nyata. Selain itu, manakala berhadapan dengan gagasan atau pembahasan yang rumit fasilitator juga perlu membingkai (*reframing*) dengan cara merangkum, menyampaikan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana, atau memberi penegasan untuk sejumlah kesimpulan untuk membantu peserta memahami topik tersebut. Proses kaji ulang dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan pengumpan:

- Apa saja yang telah kita pelajari?
- Pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian dalam proses tadi?
- Apa saja kesulitan mempraktikkannya?
- Bagaimana cara kita menghadapi situasi?

Peran fasilitator pada fase ini adalah antara lain (1) mendaftar jawaban peserta; (2) Memperjelas jawaban yang kabur; (3) Melengkapi jawaban yang belum lengkap (caranya bisa dengan mengajukan pertanyaan pengumpan); (4) Menanggapi jawaban yang tidak tepat/keliru; (5) Menggali cara-cara memanfaatkan pengetahuan yang didapat dalam situasi nyata; (6) Meringkas dan membuat kesimpulan.

d. Mengelola umpan balik

Keterampilan ini diperlukan agar para peserta mengenali kebutuhannya. Umpan balik dalam proses belajar partisipatif adalah dengan memberikan informasi (keterangan, kesan, penilaian, pendapat, atau saran) mengenai hal-hal yang disampaikan oleh para peserta. Ada tiga hal yang dapat dilakukan:

- Menawarkan informasi
Komentar fasilitator hendaknya diberikan sebagai suatu informasi, bukan sebagai “penghakiman” (*judgement*). Informasi harus obyektif dan bebas nilai, baik untuk umpan balik yang positif maupun negatif.
- Berhubungan dengan aspek tampilan
Mengomentari proses latihan yang dilakukan oleh peserta, fasilitator hendaknya menghadirkan sebanyak mungkin fakta yang berkaitan dengan tampilan. Sampaikan informasi dengan formula, “Ketika saudara melakukan... Saya pikir...”
- Membantu penerima umpan balik untuk memperbaiki tampilan
Pada dasarnya, komentar fasilitator bertujuan untuk membantu para peserta memperbaiki tampilannya. Buatlah agar si penerima umpan balik mengetahui yang terbaik dari tampilannya, sehingga ia akan mengulangnya pada kesempatan yang lain. Sampaikan pula yang buruk sehingga ia dapat menghindarinya dan tawarkan saran konstruktif yang mungkin dapat dilakukan.

Lakukan proses umpan balik segera setelah peserta mempelajari atau mempraktikkan suatu keterampilan. Proses umpan balik ini pun bisa dilakukan di antara peserta sendiri. Tiga formula tersebut, bisa digunakan sebagai acuan dan sekaligus aturan dalam proses umpan balik di antara sesama peserta. Perkenalkan dulu acuan dan aturan tersebut sebelum proses umpan balik di antara para peserta dilakukan dan fasilitator harus memastikan bahwa aturan tersebut ditegakkan.

Menghadapi Peserta Pelatihan

Dalam pelatihan, fasilitator berhadapan dengan beragam orang dan hendaknya dapat membangun iklim emosional secara efektif dan kondusif. Tugas fasilitator adalah menciptakan lingkungan yang membuat orang saling percaya serta saling mendukung dan merasa didukung. Kondisi ini diperlukan agar peserta pelatihan merasa nyaman untuk mencoba berbagai hal tanpa ketakutan karena menduga dan khawatir akan menerima kritik yang pedas. Hal yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam menghadapi peserta pelatihan adalah sebagai berikut :

Perbedaan tradisi dan gaya belajar

Setiap orang tentu punya latar belakang kebiasaan, tradisi, dan gaya belajar sendiri-sendiri. Peserta yang berpandangan terbuka selalu ingin mencoba hal-hal baru, bersemangat, tetapi mungkin saja akan mudah bosan. Ada pula peserta yang senantiasa berfikir cermat dan hati-hati: mereka ini biasanya pendengar yang baik, banyak pertimbangan, dan mungkin pula enggan menghadapi perubahan. Peserta kritis berpikir logis, mereka biasanya akan kurang nyaman dan tidak begitu yakin dengan metode belajar curah pendapat yang dalam anggapannya tidak tertib dan intuitif. Lain lagi gaya peserta yang pragmatis: mereka umumnya tidak suka bertele-tele, terlebih jika dianggap tidak jelas arahnya. Mereka yang bergaya pragmatis biasanya ingin segera memperoleh kesimpulan. Dengan metode yang beragam dan sikap yang luwes, fasilitator sedapat mungkin harus bisa membantu semua orang yang memiliki perbedaan gaya belajar tersebut untuk menjalani proses belajar.

Memahami Potensi Konflik dalam Pelatihan

Sebagai fasilitator, anda harus mampu mengamati berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi di dalam kelas atau di dalam kelompok. Konflik dapat terjadi karena berbagai perbedaan sikap, pandangan, pendapat, maupun perilaku yang berbenturan satu sama lain. Konflik secara mendasar juga dapat terjadi karena perbedaan ras, gender, etnis, agama, maupun pandangan politik dan kepentingan. Ketidakmampuan mengelola konflik yang terjadi dapat menyebabkan peserta merasa tidak aman, nyaman, terintimidasi di satu pihak berhadapan dengan pihak yang mendominasi, mengintimidasi dan kurang mau mendengar satu sama lain.

Anda juga sepatutnya sensitif pada asumsi dan bias gender yang banyak terjadi di dalam ruang publik. Oleh karena itu, di dalam suatu sesi pelatihan hendaknya fasilitator menyempatkan diri untuk mendiskusikan potensi konflik yang mungkin timbul dalam proses belajar dan bagaimana mengelola konflik tersebut. Nyatakanlah bahwa potensi konflik pasti ada, meskipun dalam kelas dimana pendidikan HAM tengah dilakukan. Ajak peserta memahami hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dan bagaimana pandangan mereka untuk mengelola konflik tersebut. Gali pengalaman peserta mengenai hal-hal apa yang bisa menimbulkan konflik di dalam kelas.

Buatlah peraturan bersama yang disepakati oleh kelompok untuk mencegah dan mengantisipasi munculnya konflik. Siapkan prinsip-prinsip penting yang harus dihormati bersama oleh semua peserta. Nyatakan bahwa meskipun mereka adalah anggota legislatif, namun di dalam kelas semua peserta, panitia, fasilitator memiliki posisi yang sama. Proses pendidikan ini hanya bisa berjalan atas dasar prinsip saling menghormati satu sama lain. Bangunlah keterampilan dalam memberikan dan menerima masukan, sehingga peserta mampu berinteraksi dengan baik dalam kelompok/kelas.

Prinsip-prinsip yang dibangun di dalam kelas dapat dikaitkan secara langsung dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948), misalnya prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, menjunjung tinggi martabat manusia, dsb.

Memahami Dinamika Kelompok

Di dalam memahami dinamika kelompok, fasilitator perlu mengamati bagaimana fase-fase pembentukan kelompok berjalan di dalam kelas. Hal ini perlu disadari karena sebelum individu dapat bekerja secara efektif dalam kelompok, maka mereka perlu melewati serangkaian tahapan. Fasilitator perlu membantu kelompok untuk melewati serangkaian tahapan kelompok ini hingga pada tahapan terakhir, yaitu:

- *Forming* (fase pembentukan kelompok)
Sekumpulan individu-individu dengan berbagai kebutuhan serta agenda mengakui diri sebagai kelompok dan membentuk aturan kelompok atau *ground rules*.
- *Storming* (fase badai dalam kelompok)
Pengenalan kelompok semakin baik, namun nilai-nilai dan prinsip pribadi akan banyak mewarnai tahap ini, peran dan tanggungjawab mulai terbangun dan/atau ditolak oleh anggota kelompok, tujuan serta cara kerja mulai perlu ditentukan dan diarahkan. Penyesuaian dan penerimaan perlu mulai dilakukan. Potensi konflik dalam kelompok tinggi pada tahap ini.
- *Norming* (fase pembentukan norma kelompok)
Pembentukan norma kelompok ditandai dengan munculnya identitas kelompok yang jelas. Peran setiap anggota kelompok telah disadari dan disepakati oleh anggota kelompok serta membangun tujuan serta kode etik (code of conduct) bersama. Pembagian peran dalam kelompok semakin jelas.
- *Performing* (fase kerja dalam kelompok)
Norma kelompok sudah stabil dan siap berfokus pada keluaran (output) kelompok serta mampu bekerja secara efektif. Memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota dalam kelompok, munculnya pembagian kekuasaan oleh anggota kelompok, semakin meningkatnya konformitas serta percaya diri kelompok membuat mereka berani mengambil resiko dan mencoba ide-ide yang dibangun bersama.

Rangkuman:

Unsur-unsur penting Mengatur Atmosfer Pelatihan

Hal-hal yang harus dilakukan:

- Tetapkan Peran anda dalam pikiran anda sendiri.
- Tetapkan harapan-harapan dan kebutuhan-kebutuhan peserta dan juga harapan anda sebagai fasilitator. Pastikan hal ini diketahui dan dipahami oleh setiap orang dalam kelompok.
- Ciptakan atmosfer yang mendukung dimana orang-orang merasa bebas untuk mengambil resiko.
- Peka terhadap proses komunikasi, termasuk bahasa tubuh peserta dan anda sendiri.
- Dengarkan dengan empati; jangan memotong.
- Hargai ide yang mungkin tidak anda setuju.
- Gunakan pujian, pengakuan, dll untuk memperkuat kepercayaan diri.
- Tunjukkan bahwa anda peduli.
- Hadapi peserta yang “sulit” dengan cara yang terhormat.
- Komunikasikan secara terus terang apa yang anda ketahui dan anda tidak ketahui.
- Selalu semangat; energi/listrik anda tampaknya akan menggosok peserta.
- Gunakan “icebreaker” dan/atau pembuka yang nyaman untuk anda dan anda rasa peserta anda juga akan merasa nyaman.

- Dapatkan umpan balik selama kegiatan dan pada akhir tiap bagian.
- Peran fasilitator dalam diskusi kelompok bukan hanya merangkum informasi yang disajikan, tetapi untuk mensintesakannya. Itu berarti fasilitator memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi unsur-unsur umum yang digaris bawahi oleh peserta, dan menyampaikan kepada peserta untuk berpikir lebih jauh apa arti kerja kelompoknya dalam hubungannya dengan kerja mereka pada pendidikan HAM.
- Buatlah diri anda terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan.
- Belajarlah dengan kelompok!

Teknik-teknik dalam Pelatihan Partisipatif²

Dalam setiap pelatihan terdapat sejumlah cara atau teknik yang bisa disajikan untuk menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari. Begitu pun dalam proses pelatihan partisipatif. Secara umum, cara-cara atau teknik-teknik yang bisa digunakan untuk pelatihan partisipatif ini tidak jauh berbeda dengan yang biasa digunakan untuk pelatihan tradisional. Hanya saja, ada beberapa perbedaan mendasar yang penting untuk diperhatikan ketika suatu cara atau teknik dipilih dan digunakan dalam proses pelatihan partisipatif. Hal ini tidak terlepas dari esensi pelatihan partisipatif itu sendiri yang memberi kesempatan seluas-luasnya kepada peserta pelatihan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar satu sama lain.

Oleh karena itu, menjadi penting bagi seorang fasilitator untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu teknik dibandingkan teknik lainnya. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan proses belajar dalam pelatihan partisipatif yang senantiasa berusaha memberi ruang kepada setiap peserta untuk meningkatkan kapasitas mereka, baik yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku.

² Daud Sy (penyunting), *Manual Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia: Pegangan Fasilitator*, Jakarta: Komnas HAM, 2006, hal. 8 - 11

Teknik-teknik yang Bisa Digunakan dalam Proses Pelatihan Partisipatif adalah sebagai berikut³ :

Untuk menyampaikan Informasi (Pengetahuan)	Untuk Mengajarkan keterampilan dan Kecakapan	Untuk Mengubah sikap dan nilai-nilai
<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi: Satu narasumber menyampaikan informasi atau gagasannya • Presentasi Panel: Dua atau lebih narasumber menyampaikan aspek-aspek yang berbeda dari topik yang sama (dibutuhkan moderator). • Debat: Dua narasumber menyampaikan pandangan yang berseberangan dan argumentasi mereka (dibutuhkan moderator). • Dialog: percakapan informal antara dua narasumber. • Pertunjukan Drama: Drama atau sketsa atau potongan fragmen yang dipersiapkan <p>Kegiatan Tindak Lanjut untuk meningkatkan pengetahuan setelah presentasi narasumber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forum: Tahapan tanya jawab, diskusi yang bersifat bebas dan terbuka sebagai tahapan lanjutan dari presentasi narasumber • Tahapan tanya jawab: Kesempatan untuk siapapun di kelas untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber • Kelompok Lebah (Buzz Groups): Diskusi kelompok antara 2-6 orang selama kurang lebih 5 menit untuk membahas isu tertentu atau pertanyaan spesifik yang diajukan oleh narasumber, hasil diskusi dibagi / dibahas kembali dengan peserta lainnya dalam kelas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kasus / Bedah kasus: Pembahasan masalah atau kasus dalam kelompok atau kelas untuk dianalisa atau dicari jalan keluarnya. • Pertunjukan: Fasilitator menunjukkan atau menjelaskan tindakan, cara, prosedur, ataupun proses secara verbal. • Permainan, Pengalaman terstruktur: Peserta ikut serta dalam permainan yang menuntut keterampilan khusus, biasanya dipimpin oleh fasilitator, tapi dapat juga diajukan oleh sesama peserta. • Simulasi: Peserta belajar suatu keterampilan tertentu yang menyerupai suatu setting nyata dimana keterampilan tersebut diperlukan • Tim belajar/Mengajar : Bekerja bersama dalam kelompok kecil antara 3 – 6 orang dimana satu sama lain saling mengajar dan membantu mengembangkan ketrampilan <p>Aktivitas tindak lanjut untuk mengembangkan keterampilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyek-proyek yang bersifat aplikatif: Aktivitas ini memberi kesempatan dan kemampuan kepada peserta untuk mempraktikkan keterampilan yang dipelajari sesuai konteks, situasi dan tingkat keahliannya masing-masing selama pelatihan • Praktik: Aktivitas khusus untuk mempraktikkan hasil belajar setelah pelatihan dalam konteks pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Respon dalam lingkaran: Pertanyaan diajukan pada anggota kelompok yang duduk dalam lingkaran, tiap orang dapat mengemukakan pendapatnya. • Kunjungan lapangan, tour: Melihat, mengunjungi, dan mengalami suatu situasi dari tempatnya secara langsung untuk pengamatan dan studi lebih lanjut. • Permainan: Mengalami suatu permainan dan mendiskusikan mengenai aplikasinya dalam kehidupan nyata. • Diskusi Kelompok: Pertukaran pengetahuan dan gagasan yang saling memberi manfaat antara anggota kelompok sedang (antara 8 – 20 peserta) mengenai suatu masalah atau isu yang menjadi keprihatinan bersama selama kurang lebih 40 menit (tergantung besar kelompok dan kompleksitas isunya) • Bermain peran (Role Playing): Drama yang dipersiapkan mengenai suatu masalah atau situasi yang dilanjutkan dengan diskusi. • Simulasi: diambil dari pengalaman dan dibuat sedekat mungkin dengan kondisi nyata dan diikuti dengan diskusi. • Sketsa atau Fragmen: Drama pendek yang diikuti dengan diskusi.

³ Dikutip dari *Manual Workshop TOT Pendidikan HAM* yang dilakukan oleh Equitas

Pengorganisasian Pelatihan

Susunan kegiatan dan alokasi waktu

Jumlah Waktu (menit)	Nama Kegiatan	Metode
Pembuka		
15	Pembukaan	Ceramah
45	Perkenalan	Permainan, Diskusi Kelompok
15	Identifikasi Harapan dan Sumber daya	Curah pendapat
15	Kontrak Belajar	Curah Pendapat
15	Alur dan Metodologi Belajar	Curah Pendapat
Modul 1		
90	Kegiatan 1 Konsep dasar HAM dan Prinsip-prinsipnya	Curah Pendapat, Diskusi Kelompok
120	Kegiatan 2 Tantangan dan Peluang HAM di NAD	Pemetaan, Diskusi Kelompok
120	Kegiatan 3 HAM dan Hukum Domestik	Ceramah, Tanya Jawab
Modul 2		
90	Kegiatan 1 Pendekatan Berbasis HAM dalam penyusunan Kebijakan	Ceramah, Tanya Jawab
120	Kegiatan 2 Penerapan Fungsi Legislasi berbasis HAM	Bedah Qanun, Diskusi Kelompok Presentasi, Tanya Jawab
120	Kegiatan 3 Penerapan Fungsi Penganggaran berbasis HAM	Bedah Kasus, Diskusi Kelompok, Presentasi, Tanya Jawab
120	Kegiatan 4 Penerapan Fungsi Pengawasan berbasis HAM	Simulasi / Role Play, Diskusi, Presentasi, Tanya Jawab
Penutup		
60	Tindak Lanjut	Diskusi Kelompok, Presentasi
30	Evaluasi	Evaluasi Tertulis dan Lisan
15	Penutupan	Ceramah

Catatan:

- Total alokasi waktu belajar yang diperlukan untuk pelatihan ini adalah 990 menit atau kurang lebih 16 jam 30 menit.
- Pastikan cukup waktu untuk rehat pagi dan sore masing-masing sekitar 30 menit
- Pastikan cukup waktu untuk istirahat siang selama 90 menit dan istirahat petang/malam selama 120 menit
- Waktu mulai adalah pukul 09.00 pagi dan waktu selesai pukul 18.00 sore
- Jika dimungkinkan sesi malam maksimal 120 menit antara pukul 20.00 – 22.00

Menyiasati Ketidakhadiran di Kelas: Pembelajaran dari Pengalaman Uji Coba

Mereka mengkonfirmasi keikutsertaan dalam pelatihan, mereka hadir di tempat pelatihan kurang lebih pada saatnya, namun pada proses pelatihan mereka terlihat tidak betah atau bahkan terkesan menyepikan. Mereka meninggalkan ruangan seenaknya untuk merokok, bertelepon, asyik membuka situs jejaring sosial atau situs internet *trendy* lainnya dan berlama-lama saat rehat, mengobrol (atau dalam istilah keren salah kaprah: *“lobby politik”*). Bahkan dalam amatan salah seorang fasilitator dalam seri pelatihan terdahulu waktu mulai dan selesai hampir selalu tidak pernah tepat waktu, kadang kala terlambat paling sedikit antara 30 – 45 menit.

Mengapa ini terjadi? Apakah karena keberadaan mereka sebagai anggota legislatif telah menumbuhkan arogansi dan karenanya mereka merasa dapat bertingkah seenaknya? Ataukah mereka menganggap pelatihan ini “tidak penting-penting amat”? Atau adakah penyebab lain yang tak terbaca di permukaan? Dan pertanyaan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengatasinya jika salah satu atau lebih gejala ini muncul?

Kemungkinan penjelasan atas perilaku ini adalah:

1. Peserta pelatihan menganggap materi yang ditawarkan tidak atau kurang relevan dengan kepentingan mereka yang hakiki.
2. Rendahnya pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh peserta sendiri untuk ikut serta dalam kegiatan ini membuat mereka tidak merasa rugi jika mereka tidak atau kurang menyerap materi yang diajarkan
3. Materi yang diajarkan terlalu sulit dan/atau metodologi yang digunakan tidak konsisten dengan tujuan dan pendekatan pelatihan

Bagaimana mengatasi hal ini? Mengingat status para peserta sebagai orang-orang yang berkepentingan secara hakiki untuk memperoleh, memperbesar atau mempertahankan kekuasaan maka penyelenggara kegiatan haruslah dapat mengaitkan secara rasional kedua kutub ini. Atau dengan kata lain penyelenggara kegiatan haruslah dapat menjelaskan secara rasional bahwa hasil pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk bekerja lebih baik melayani konstituennya, sehingga membuka peluang yang lebih besar bagi mereka untuk memperoleh, mempertahankan atau memperbesar posisinya sebagai anggota legislatif.

Penyelenggara kegiatan hendaknya dapat pula menanamkan kesan bahwa peserta telah berinvestasi dalam pelatihan ini, di luar tenaga dan waktu yang mereka “korbankan” untuk belajar. Dengan demikian peserta akan merasa rugi setiap kali mereka absen dari kegiatan belajar. Perlu pula ditumbuhkan kesan bahwa masyarakat (rakyat Aceh, konstituen, partai, lembaga legislatif, penyelenggara kegiatan, dll) telah bersama-sama berinvestasi insani atas diri mereka dalam bentuk pengembangan kapasitas mereka sebagai anggota dewan agar mereka dapat lebih produktif. “Utang moral” seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap lebih bertanggung jawab yang dijawabantahkan dalam bentuk disiplin belajar yang lebih baik.

Ketiga Problem di atas muncul dari kecurigaan bahwa peserta merasa frustrasi karena tidak dapat sepenuhnya mengikuti dan mengerti topik-topik diskusi yang berat dan akademik. Rasa frustrasi itu diungkapkan dalam bentuk ketidakacuhan pada materi itu. Jadi yang sesungguhnya terjadi bukanlah arogansi tetapi justru ketidakberdayaan karena materi pembelajaran di luar jangkauan dan daya nalar mereka. Bukannya ketidakacuhan itu tanda kemalasan, tapi justru jeritan minta tolong yang diredam (*the silent cry for help*).

Masalah ketiga ini dapat didekati dan diantisipasi dengan menerapkan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogi*) dengan lebih konsisten. Asumsinya adalah jika pendekatan andragogi diterapkan dengan konsisten maka tidak ada hal yang tidak dapat dimengerti karena materi pembelajaran diambil secara induktif dari pengamatan, pengalaman hidup dan pengetahuan para peserta sendiri.

Susunan Panitia dan Tim Kerja yang diperlukan

Untuk Penyelenggaraan Pelatihan ini diperlukan tim kerja sebagai berikut:

1. Koordinator kegiatan
Koordinator kegiatan bertugas mengkoordinasikan keseluruhan kegiatan dan memastikan kegiatan pelatihan berlangsung dari awal hingga akhir dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh penyelenggara.
2. Fasilitator
Fasilitator bertugas memandu proses belajar, membantu peserta untuk memahami materi dan terlibat dalam proses belajar. Fasilitator juga harus memastikan terciptanya kondisi atau atmosfer belajar yang kondusif bagi seluruh peserta, fasilitator, narasumber dan panitia.
3. Notulen / Perekam proses
Perekam proses bertugas mencatat keseluruhan proses belajar, termasuk presentasi, tanya jawab dalam diskusi. Perekam proses juga membantu fasilitator merangkum poin-poin penting dalam diskusi.
4. Asisten / Co-Fasilitator
Membantu fasilitator memandu proses belajar, membantu peserta untuk memahami materi dan terlibat dalam proses belajar. Co-Fasilitator juga harus memastikan terciptanya kondisi atau atmosfer belajar yang kondusif bagi seluruh peserta, fasilitator, narasumber dan panitia. Secara khusus, co-fasilitator diharapkan dapat mempersiapkan kebutuhan kelas dan bahan belajar.
5. Petugas Logistik
Petugas Logistik bertugas memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, baik untuk kebutuhan belajar maupun kebutuhan akomodasi, konsumsi dan transportasi peserta.
6. Sekretariat
Sekretariat bertugas membangun dan mengelola kontak dengan peserta, memastikan tersebarnya undangan / aplikasi peserta, dan konfirmasi kehadiran berikut presensinya. Sekretariat juga bertugas mengatur keuangan dan menyiapkan kebutuhan administrasi terkait dengan perijinan dan kerjasama kelembagaan.

Bagaimana Menggunakan Manual ini

Sebagai fasilitator maupun penyelenggara pelatihan, anda dapat menggunakan manual ini sebagai panduan. Namun demikian, anda tetap disarankan untuk menemui ahli hak asasi manusia, ahli pendidikan hak asasi manusia, dan ahli sosial politik di wilayah Aceh untuk mendapatkan tambahan referensi dan pengetahuan sebelum menyelenggarakan pelatihan. Manual ini merupakan pemandu, bahan rujukan, dan memuat berbagai informasi yang membantu proses belajar secara mandiri. Agar mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda juga disarankan untuk terus menerus memantau isu atau tema-tema diskusi dan kasus aktual yang tengah menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam.

Manual “Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis Hak dalam Fungsi-Fungsi Legislatif” ini memuat garis besar kegiatan pelatihan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, tujuan, serta alokasi waktu untuk setiap kegiatan. Untuk beberapa kegiatan dalam pelatihan ini, disediakan pula Kertas Kerja dan Lembar Acuan – Reference Sheets. Kasus-kasus yang disajikan dalam manual ini bersifat hipotetik yang inspirasinya diambil dari media.

Cakupan Manual

Manual Utama

Pengantar

Titik Berangkat untuk Fasilitator dan Penyelenggara

- Bagaimana mempersiapkan Pelatihan ini
- Bagaimana menggunakan Manual ini

Pembukaan, Perkenalan, Orientasi belajar

Modul 1: Peningkatan pemahaman dan kesadaran HAM

- Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Hak asasi Manusia
- Tantangan dan Peluang HAM di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Hak Asasi Manusia dalam Hukum Domestik

Modul 2: Mengintegrasikan Pendekatan berbasis Hak dalam fungsi-fungsi legislatif

- Mengenal Pendekatan Berbasis HAM dalam penyusunan kebijakan
- Penerapan Fungsi Legislasi berbasis HAM
- Penerapan Fungsi Penganggaran berbasis HAM
- Penerapan Fungsi Pengawasan berbasis HAM

Evaluasi dan Penutup

Bacaan Penunjang

Buku ini juga menyediakan bahan bacaan penunjang pelatihan. Materi-materi yang dikumpulkan dalam buku penunjang merupakan instrumen pokok hak asasi manusia serta sejumlah artikel yang menjelaskan teori dan praktik yang dilakukan di dalam pelatihan. Sejumlah bacaan penunjang merupakan instrumen pokok hak asasi manusia di tingkat internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan menjadi sumber hukum nasional.

Bagaimana Mendapatkan Manual ini

Manual ini didistribusikan secara cuma-cuma. Untuk mendapatkannya anda dapat menghubungi:

DEMOS

Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Griya Upakara, Lantai 3 Unit 3.

Jl. Cikini IV No.10 Jakarta Pusat

Indonesia

Phone. 62-21-39899777 Fax. 62-21-3147897

E-mail: office@demos.or.id

Web-site: www.demosindonesia.org

Pembukaan, Perkenalan, dan Orientasi Belajar

Pengantar

Dalam hal pemajuan dan perlindungan HAM, Badan Legislatif dan para anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah merupakan aktor yang sangat penting, mengingat peran legislatif secara keseluruhan berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan eksekutif yang mencakup keseluruhan spektrum hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan hal itu memberikan pengaruh langsung bagi penikmatan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan urusan-urusan publik, maka tak dapat disangkal bahwa parlemen adalah pengawal hak asasi manusia. Anggota parlemen selayaknya menyadari peran tersebut karena perdamaian dan kondisi politik, sosial, dan ekonomi bangsa akan sangat ditentukan oleh sejauh mana hak asasi manusia dituangkan pada pelaksanaan fungsi-fungsi parlemen. Anggota parlemen sepatutnya memahami Konstitusi sebagai penjaga hak asasi manusia, serta peran negara sebagai pemangku kewajiban dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Modul ini merupakan modul pembuka yang menekankan kejelasan arah, tujuan, sasaran, dan implementasi kegiatan pelatihan dalam setiap tahapannya. Dalam modul pembuka ini dijelaskan apa dan untuk apa pendidikan HAM serta pendekatan yang digunakan dalam pendidikan HAM. Dalam upaya peningkatan kapasitas anggota Parlemen di bidang HAM, maka kerja-kerja Pendidikan HAM merupakan langkah strategis yang harus dimulai. Dalam merancang pendidikan HAM, sikap saling menghormati pandangan, terbuka, berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta tetap berupaya menyelami pikiran satu sama lain semasa perencanaan dan pelaksanaan program adalah nilai-nilai penting yang harus diterapkan. Pendekatan partisipatif tidak hanya berhenti sampai di ranah teori.

Pada program ini, penyelenggara mengintegrasikan pendekatan tersebut ke dalam setiap aspek rancangan dan pelaksanaan program pelatihan. Program pelatihan ini berbasis pendekatan partisipatif yang percaya pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. Prinsip-prinsip yang mengedepankan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara partisipan dengan partisipan, juga partisipan dengan narasumber, dan partisipan dengan fasilitator. Fasilitator dan partisipan setia dengan kesepakatan untuk bersama-sama membangun proses belajar yang saling memperkuat diri mereka.

Penekanan pada pengalaman, penerapan, merancang strategi baru untuk tindakan ke depan, dan melakukan aksi-refleksi terus menerus serta evaluasi adalah pusat pembelajaran program pelatihan ini. Asumsi penting yang dikembangkan oleh pendekatan program pelatihan ini bahwa muatan isi terbanyak akan datang dari partisipan dan program pelatihan akan menyajikan kerangka kerja untuk menampilkannya. Partisipan yang datang bukanlah bagai gelas kosong yang perlu diisi. Mereka datang seperti gelas yang penuh dengan pengetahuan dan pengalaman praktis. Program pelatihan ini menyediakan kesempatan bagi partisipan untuk saling mempertukarkannya, sehingga semakin kaya pengetahuan dan pengalaman.

Tujuan Modul

1. Menjelaskan kepada peserta tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan
2. Memberi kesempatan kepada peserta untuk saling mengenal satu sama lain.
3. Mengembangkan aturan bersama kelompok selama pelatihan untuk membangun dinamika kelompok yang efektif.
4. Mengkaji tujuan dan sasaran pelatihan dikaitkan dengan harapan peserta dan sumber daya yang tersedia.
5. Menjelaskan Model Spiral Belajar dan rancangan model yang digunakan dalam pelatihan.
6. Menjelaskan kepada peserta tentang informasi umum proses pelatihan, bahan belajar yang disediakan, serta berbagai pengaturan teknis dan administratif untuk mendukung pelatihan.

Kegiatan:

1. Kegiatan 1	Pembukaan	15 menit
2. Kegiatan 2	Perkenalan	45 menit
3. Kegiatan 3	Identifikasi Harapan dan Sumber Daya dan Menyepakati aturan belajar	15 menit
4. Kegiatan 5	Metodologi dan Alur Belajar	15 menit

Bahan belajar

1. Gambar Telapak Tangan
2. Lembar Rujukan 1: Spiral belajar
3. Lembar Rujukan 2 : Mengenal pendekatan partisipatif
4. Lembar Rujukan 3 : Alur Belajar
5. Jadwal Acara
6. Modul Pelatihan
7. Modul Bacaan
8. Spidol/Marker
9. Kertas Plano dan papan Flipchart
10. Kartu Metaplan
11. Tape kertas



Catatan Untuk Fasilitator

Modul ini adalah Modul Pendahuluan. Sesi dibuka dengan penjelasan mengenai program yang akan diselenggarakan oleh DEMOS. Sebelum sesi-sesi pada modul 1 ini dimulai, pastikan fasilitator menyiapkan:

1. Buku manual secara lengkap sesuai dengan jumlah peserta
2. Peta provinsi yang dilengkapi dengan nama-nama peserta tertulis dalam *post it* dan ditempatkan di peta sesuai dengan representasi wilayah. Dapat juga dilakukan secara bersama-sama, peserta menempatkan namanya di peta tersebut
3. Presentasi untuk pembukaan dan pointers mengenai tujuan program pendidikan
4. Poster spiral belajar dan *flow* modul-modul dalam spiral belajar

Pastikan agar tujuan yang hendak dicapai dapat disampaikan secara lugas, jelas, dan dipahami oleh peserta. Fasilitator dapat mengulangi dan menekankan kembali hal-hal penting yang hendak dicapai dari pelatihan ini dan terutama dari modul ini.

|||||

Kegiatan 1 Pembukaan

Tujuan

1. Peserta mengenal DEMOS dan kerja-kerja DEMOS dalam bidang demokrasi dan HAM di tingkat nasional dan di Aceh
2. Peserta paham tentang latar belakang, tujuan, dan sasaran pelatihan
3. Peserta paham pentingnya penguatan kapasitas anggota Parlemen dalam mengintegrasikan HAM dalam kerja-kerja legislatif

Waktu

15 menit

Deskripsi

15 menit

1. Kordinator Kegiatan menyambut kehadiran peserta dan mengundang Direktur Eksekutif DEMOS membuka acara pelatihan HAM untuk para anggota Legislatif Aceh.
2. Direktur Eksekutif DEMOS memberi pengantar kegiatan, menguraikan latar belakang dan membuka acara pelatihan.
3. Kordinator Kegiatan menjelaskan beberapa hal yang sifatnya teknis, termasuk jadwal, kelengkapan, akomodasi, bahan belajar, serta hal-hal yang mendukung terselenggaranya pelatihan.
4. Kordinator Kegiatan memperkenalkan dan mengundang fasilitator untuk memulai kegiatan pelatihan

Catatan Untuk Fasilitator

Kegiatan 2: Perkenalan

Perkenalan dapat diubah tekniknya dengan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi peserta.

Pilihlah teknik-teknik yang dapat mendorong peserta untuk menggali pengalaman dan empati peserta. Dilain pihak, pastikan peserta memahami maksud dari kegiatan ini, bukan hanya berkenalan saja tapi juga berbagi pengetahuan dan pengalaman yang belum pernah diketahui sebelumnya. Patut diperhatikan kondisi peserta yang bisa jadi menghendaki suasana yang lebih resmi / formal. Kegiatan ini dapat disesuaikan dan dimodifikasi dengan menyediakan *name tag* / papan nama resmi. Fasilitator perlu memastikan kebutuhan tersebut dapat diantisipasi sebelumnya.

|||||

Kegiatan 2 Perkenalan: “Game Telapak Tangan”

Tujuan

1. Peserta mengenal nama-nama dan latar belakang peserta satu sama lain.
2. Membangun suasana yang lebih akrab sehingga dapat menghilangkan sekat-sekat yang dapat membatasi kebersamaan dalam pembelajaran.
3. Membangun dinamika kelompok.
4. Membangun suasana kerja sama dengan sesama peserta lain dalam kelompok
5. Membangun identitas positif kelompok dengan mengasosiasikan diri pada nilai-nilai positif tertentu.
6. Mengidentifikasi harapan peserta terhadap pelatihan.

Waktu

45 menit

Deskripsi

10 menit	Bagian A	Tugas Individual dalam kelompok
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan kegiatan dan bagaimana kegiatan akan dilakukan. 2. Minta peserta untuk membentuk kelompok (maksimal 5 orang tiap kelompok) 3. Bagikan gambar telapak tangan untuk setiap kelompok 4. Minta setiap peserta bergantian mengisi identitas masing-masing pada satu jari (4 ruas) dalam gambar tangan itu dengan informasi mengenai: <ul style="list-style-type: none"> - nama, (ruas 1) - lembaga/partai, (ruas 2) - daerah asal/daerah pemilihan (ruas 3) - hobby (ruas 4), dan - harapan selama training (telapak tangan)
10 menit	Bagian B	Tugas Kelompok
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Minta kelompok mendiskusikan dan memilih nama untuk kelompok mereka sendiri dan tuliskan di bagian atas kertas gambar telapak tangan. 2. Minta kelompok untuk mendiskusikan dan memutuskan “kebanggaan kelompok” dalam bentuk nilai-nilai positif, misalnya “Kelompok kami adalah kelompok yang paling disiplin”, “paling bersungguh-sungguh dalam belajar”, “paling demokratis” dan sebagainya. Tuliskan kebanggaan kelompok itu di bawah nama kelompok.

15 menit **Bagian C** **Tugas Kelompok kelas**

1. Beri kesempatan kepada setiap orang dalam masing-masing kelompok untuk memperkenalkan kelompoknya kepada pleno dengan membacakan satu aspek saja.
 - Orang pertama memperkenalkan nama kelompok dan kebanggaan kelompok.
 - orang kedua memperkenalkan nama-nama anggota kelompoknya dengan membacakan ruas pertama dari kelima jari,
 - orang ketiga memperkenalkan institusi/partai anggota kelompoknya dengan membacakan ruas kedua dari kelima jari,
 - orang keempat memperkenalkan daerah asal/daerah pemilihan anggota kelompoknya dengan membacakan ruas ketiga dari kelima jari,
 - orang kelima memperkenalkan hobby anggota kelompoknya dengan membacakan ruas keempat dari kelima jari. Biarkan harapan yang telah ditulis di telapak tangan tidak dibacakan dulu, untuk dianalisis dalam kegiatan berikutnya.
2. Selanjutnya perkenalkan pula tim panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan agar peserta mengenalnya dan mengetahui siapa yang harus dikontak jika mereka membutuhkan.
3. Sampaikan pula bahwa panitia menyediakan 'kotak demokrasi' untuk mereka yang ingin menyampaikan keluhan atau saran selama pelatihan berlangsung. Selain itu juga sediakan 'parking lot' untuk isu-isu yang tidak dapat atau tidak sempat dibahas selama sesi agar dapat dicatat dan dilihat bersama untuk didiskusikan kembali.

Catatan Untuk Fasilitator

Sebagai fasilitator, anda harus mampu mengamati berbagai potensi konflik yang mungkin terjadi di dalam kelas atau di dalam kelompok. Konflik dapat terjadi karena berbagai perbedaan sikap, pandangan, pendapat, maupun perilaku yang berbenturan satu sama lain. Konflik secara mendasar juga dapat terjadi karena perbedaan ras, gender, etnis, agama, maupun pandangan politik dan kepentingan. Ketidakmampuan mengelola konflik yang terjadi dapat menyebabkan peserta merasa tidak aman, nyaman, terintimidasi di satu pihak berhadapan dengan pihak yang mendominasi, mengintimidasi dan kurang mau mendengar satu sama lain.

Anda juga sepatutnya sensitif pada asumsi dan bias gender yang banyak terjadi di dalam ruang publik. Oleh karena itu, di dalam suatu sesi pelatihan hendaknya fasilitator menyempatkan diri untuk mendiskusikan potensi konflik yang mungkin timbul dalam proses belajar dan bagaimana mengelola konflik tersebut. Nyatakanlah bahwa potensi konflik pasti ada, meskipun dalam kelas dimana pendidikan HAM tengah dilakukan. Ajak peserta memahami hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dan bagaimana pandangan mereka untuk mengelola konflik tersebut. Gali pengalaman peserta mengenai hal-hal apa yang bisa menimbulkan konflik di dalam kelas. Buatlah peraturan bersama yang disepakati oleh kelompok untuk mencegah dan mengantisipasi

munculnya konflik. Siapkan prinsip-prinsip penting yang harus dihormati bersama oleh semua peserta. Nyatakan bahwa meskipun mereka adalah anggota legislatif, namun di dalam kelas semua peserta, panitia, fasilitator memiliki posisi yang sama proses pendidikan ini hanya bisa berjalan atas dasar prinsip saling menghormati satu sama lain.

Bangun keterampilan memberikan dan menerima masukan, sehingga peserta mampu berinteraksi dengan baik dalam kelompok / kelas. Prinsip-prinsip yang dibangun di dalam kelas dapat dikaitkan secara langsung dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM, 1948), misalnya prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, menjunjung tinggi martabat manusia, dsb.

Di dalam memahami dinamika kelompok, fasilitator perlu mengamati bagaimana fase-fase pembentukan kelompok berjalan di dalam kelas. Hal ini perlu disadari karena sebelum individu dapat bekerja secara efektif dalam kelompok, maka mereka perlu melewati serangkaian tahapan. Fasilitator perlu membantu kelompok untuk melewati serangkaian tahapan kelompok ini hingga pada tahapan terakhir sebagaimana telah disebutkan di bagian awal manual ini, yaitu:

1. *Forming (fase pembentukan kelompok)*

Sekumpulan individu-individu dengan berbagai kebutuhan serta agenda mengakui diri sebagai kelompok dan membentuk aturan kelompok atau *ground rules*.

2. *Storming (fase badai dalam kelompok)*

Pengenalan kelompok semakin baik, namun nilai-nilai dan prinsip pribadi akan banyak mewarnai tahap ini, peran dan tanggungjawab mulai terbangun dan/atau ditolak oleh anggota kelompok, tujuan serta cara kerja mulai perlu ditentukan dan diarahkan. Penyesuaian dan penerimaan perlu mulai dilakukan. Tingginya potensi konflik dalam kelompok pada tahap ini.

3. *Norming (fase pembentukan norma kelompok)*

Pembentukan norma kelompok ditandai dengan munculnya identitas kelompok yang jelas. Peran setiap anggota kelompok telah disadari dan disepakati oleh anggota kelompok serta membangun tujuan serta kode etik (*code of conduct*) bersama. Pembagian peran dalam kelompok semakin jelas.

4. *Performing (fase kerja dalam kelompok)*

Norma kelompok sudah stabil dan siap berfokus pada keluaran (*output*) kelompok serta mampu bekerja secara efektif. Memahami kekuatan dan kelemahan setiap anggota dalam kelompok, munculnya pembagian kekuasaan oleh anggota kelompok, semakin meningkatnya konformitas serta percaya diri kelompok membuat mereka berani mengambil resiko dan mencoba ide-ide yang dibangun bersama.

|||||

Kegiatan 3 Identifikasi Harapan dan Sumber Daya, serta Menyepakati Aturan Belajar

Tujuan

1. Peserta dapat mengidentifikasi harapan-harapan pribadi dan mengembangkannya menjadi harapan bersama
2. Peserta dapat mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di antara sesama peserta untuk bisa dimanfaatkan secara bersama bagi kepentingan proses belajar di kelas
3. Peserta mampu mengembangkan aturan bersama kelompok selama pelatihan untuk membangun dinamika kelompok yang efektif
4. Peserta tahu apa yang boleh dan tidak boleh selama proses pelatihan yang dibangun dari kesepakatan bersama
5. Peserta dapat bekerja sama dengan sesama peserta lain dalam semangat saling menghormati dan menghargai

Waktu

30 menit

Deskripsi

15 menit

Bagian A

Tugas kelompok

Pada kegiatan sebelumnya peserta mendapat penjelasan tentang program dan telah saling berkenalan. Selanjutnya, pada kegiatan ini, fasilitator bersama-sama peserta akan mengidentifikasi harapan dan sumberdaya yang tersedia di kelas yang dapat membantu proses belajar.

1. Fasilitator meminta satu orang dari masing-masing kelompok membacakan harapan kelompok yang telah dituliskan di bagian telapak tangan pada gambar yang digunakan pada bagian 1 dan 2
2. Fasilitator menuliskan kembali harapan-harapan itu pada kertas plano yang lain dan mengklasifikasikan harapan peserta dalam kelompok besar (materi, proses dan metode)
3. Fasilitator merangkum hasil identifikasi harapan-harapan peserta dan memastikan mana dari harapan-harapan tersebut yang dapat secara langsung dipenuhi oleh proses pelatihan.

15 menit Bagian B Tugas Kelompok kelas

Pada bagian ini fasilitator akan membantu mengembangkan sejumlah aturan dasar agar dapat bekerja secara efektif sebagai sebuah kelompok dan sepakat menghormatinya sebagai aturan pelatihan. Contoh-contoh aturan dasar yang berguna dan dapat disepakati:

- n Setiap orang diberikan kesempatan bicara
- n Menghormati pendapat setiap orang
- n Menghormati waktu diskusi yang tersedia, dan seterusnya

Langkah-langkah:

1. Dalam kelompok besar, fasilitator akan memimpin sumbang saran (*brainstorming*) mengenai aturan-aturan dasar. Fasilitator menuliskan pada *flipchart* dan menempelkannya di dalam ruangan sebagai pengingat selama pelatihan.
2. Dalam Kegiatan ini penting bagi fasilitator memastikan bahwa seluruh anggota kelompok merasa nyaman dengan aturan-aturan tersebut dan setuju untuk menghormatinya.

Catatan Untuk Fasilitator

Membangun dan mematuhi Aturan Bersama

Selalulah sadar bahwa ada kemungkinan kesepakatan yang dibangun dalam kontrak belajar akan dilanggar dalam proses belajar, karena itu selain membangun komitmen di awal adalah penting juga untuk mengambil peran terus menerus mengingatkan peserta akan komitmen ini. Kesepakatan tidak akan ada artinya jika tidak dipatuhi dan ditegakkan (*enforcement*). Sistem *reward and punishment* adakalanya (sekalipun tidak selalu) akan membantu untuk menegakkan komitmen ini.

Waktu Sebagai Sumber Daya Milik Bersama

Dalam suatu perhitungan oleh salah seorang fasilitator terhadap alokasi waktu yang terpakai untuk pelatihan ini terlihat waktu belajar adalah sekitar 16,5 jam dan waktu untuk jeda adalah sekitar 12 jam. Ini berarti setiap kali peserta bekerja selama 1,25 jam mereka akan mendapat waktu istirahat sebesar 1 jam. Dari sudut pandang efisiensi rasio waktu kerja dan istirahat demikian tergolong dalam produktivitas rendah. *

Fakta ini perlu diberitahu kepada peserta untuk membangun kesadaran betapa terbatasnya sumber daya waktu yang tersedia sebagai input untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya kesadaran ini diharapkan dapat tumbuh rasa tanggung jawab dan komitmen sehingga tingkat kehadiran peserta dan keterlibatan dalam kegiatan belajar dapat diperbaiki⁴.

⁴ M.M. Billah *Catatan Lepas atas Materi dan Proses Pelatihan 'Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM dalam Fungsi-fungsi Legislatif' disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Perbaikan Modul 'Pelatihan Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota', Hotel Santika, Bumi Serpong Damai, Tangerang, 18 September 2010*

Membangun Komitmen Bersama Dalam Hubungan Struktural atau Personal

Dari pengalaman Pelatihan putaran 1 – 10 salah satu persoalan yang mengemuka dari pengalaman seri pelatihan terdahulu adalah rendahnya tingkat kehadiran peserta pada keseluruhan pelatihan. Datang ke tempat pelatihan beberapa jam setelah pelatihan dimulai dengan alasan jarak yang jauh dari domisili peserta, bahkan dalam beberapa kasus tidak hadir sama sekali sampai pelatihan selesai sekalipun telah mengkonfirmasi kehadiran setelah undangan diterima. Akibatnya sering sekali peserta lain yang telah hadir dirugikan, atau penyelenggara dirugikan karena hanya sejumlah kecil peserta yang datang. Kondisi ini membuat dana dan sumber daya lain yang dikerahkan untuk melaksanakan pelatihan menjadi tidak efisien, atau lembaga legislatif di Aceh secara umum dirugikan karena jatah yang tak terisi ini semestinya dapat diisi dan dioptimalkan oleh anggota legislatif lain yang lebih berkomitmen.

Bagaimana mengatasi hal ini? Mengingat status para peserta sebagai orang-orang yang terikat pada institusi maka setidaknya dua pendekatan dapat ditawarkan. Yang pertama adalah dengan mengikat hubungan atau komitmen moral institusional dengan lembaga tempat calon peserta bekerja, dalam hal ini partai dan atau lembaga legislatif tempat calon peserta bekerja. Jika komitmen ini didapatkan maka pejabat yang berwenang di lembaga itu selalu dapat ditagih untuk menggunakan kewenangan struktural yang dimilikinya untuk “memaksa” peserta untuk hadir pada waktunya.

Alternatif lain adalah dengan mengikat komitmen personal dengan calon peserta. Pendekatan ini dapat menjadi efektif karena penyelenggara kegiatan selalu dapat menagih kehadiran peserta langsung kepada yang bersangkutan. Hanya saja pendekatan ini bisa menjadi tidak dapat terlaksana karena hubungan patriarkhal yang justru menjadi kekuatan pendekatan pertama. Belajar dari pengalaman seri pelatihan terdahulu jika pemegang kekuasaan struktural institusional merasa berkepentingan terhadap hadir tidaknya peserta dalam pelatihan itu maka kekuasaan itu dapat digunakan untuk “menyabotase” kehadiran peserta sekalipun yang bersangkutan telah menjanjikan kehadirannya. Salah seorang sekretaris DPRK mengancam tidak akan mengesahkan Laporan Perjalanan Dinas anggota dewan jika yang bersangkutan bersikukuh ikut dalam pelatihan yang telah disetujuinya untuk dihadiri. Itu hanya satu contoh.

Kegiatan 4 Metodologi dan Alur Belajar

Tujuan

1. Peserta paham metodologi partisipatif dan pendidikan orang dewasa yang akan digunakan dalam pelatihan
2. Peserta mengenal model spiral belajar dan rancangan alur belajar yang digunakan dalam pelatihan
3. Peserta mendapatkan modul pelatihan sebagai bahan belajar dan mengerti bagaimana menggunakan modul tersebut.

Waktu

15 menit

Deskripsi

15 menit

1. Fasilitator akan menggali pandangan peserta mengenai pendidikan partisipatif, model spiral belajar, dan mengapa DEMOS menggunakan pendekatan ini dalam pelatihan
2. Fasilitator menjelaskan alur belajar dan rancangan pelatihan selama 3 hari

Catatan Untuk Fasilitator

Merujuk pada alur belajar yang telah disusun dan spiral belajar, ajak peserta untuk mendiskusikan model pendidikan partisipatif dan spiral belajar yang akan digunakan dalam pendidikan ini.

1. Tayangkan model spiral belajar dan model pakar, diskusikan perbedaan dan persamaannya. Tuliskan jawaban-jawaban tersebut di *flipchart*. Nyatakan bahwa model pakar bertumpu pada pengetahuan narasumber sedangkan model spiral bertumpu pada pengalaman peserta
2. Sampaikan mengapa DEMOS menggunakan model belajar tersebut dan kaitkan dengan pendekatan partisipatif dan bagaimana orang dewasa belajar.
3. Beberapa alasan yang dapat disampaikan:

Di dalam spiral belajar, bukan hanya pengetahuan dan pengalaman narasumber yang dihargai, tapi juga – dan bahkan lebih penting --pengetahuan dan pengalaman peserta.

Dalam model spiral semua orang mengajar, semua orang belajar dalam proses bersama membangun pengetahuan. Proses bersama dalam membangun pengetahuan bersama tersebut merupakan refleksi kritis dari pengalaman dan proses belajar diri sendiri dan orang lain.

Kebanyakan proses belajar dapat berjalan efektif manakala dipraktikkan. Dalam spiral belajar pendidikan mengacu pada tindakan untuk perubahan sosial dan bukan untuk memelihara atau mereproduksi status quo.

Dikutip dari : 2007 *International Human Rights Training Program* – Equitas, hal. 1-26



Debriefing / Evaluasi

Tujuan

1. Peserta mengenal satu sama lain dan memahami tujuan Bagian Pembukaan
2. Peserta mampu merefleksikan proses yang dilakukan dalam Bagian Pembukaan dalam pekerjaan sehari-hari

Waktu

10 menit

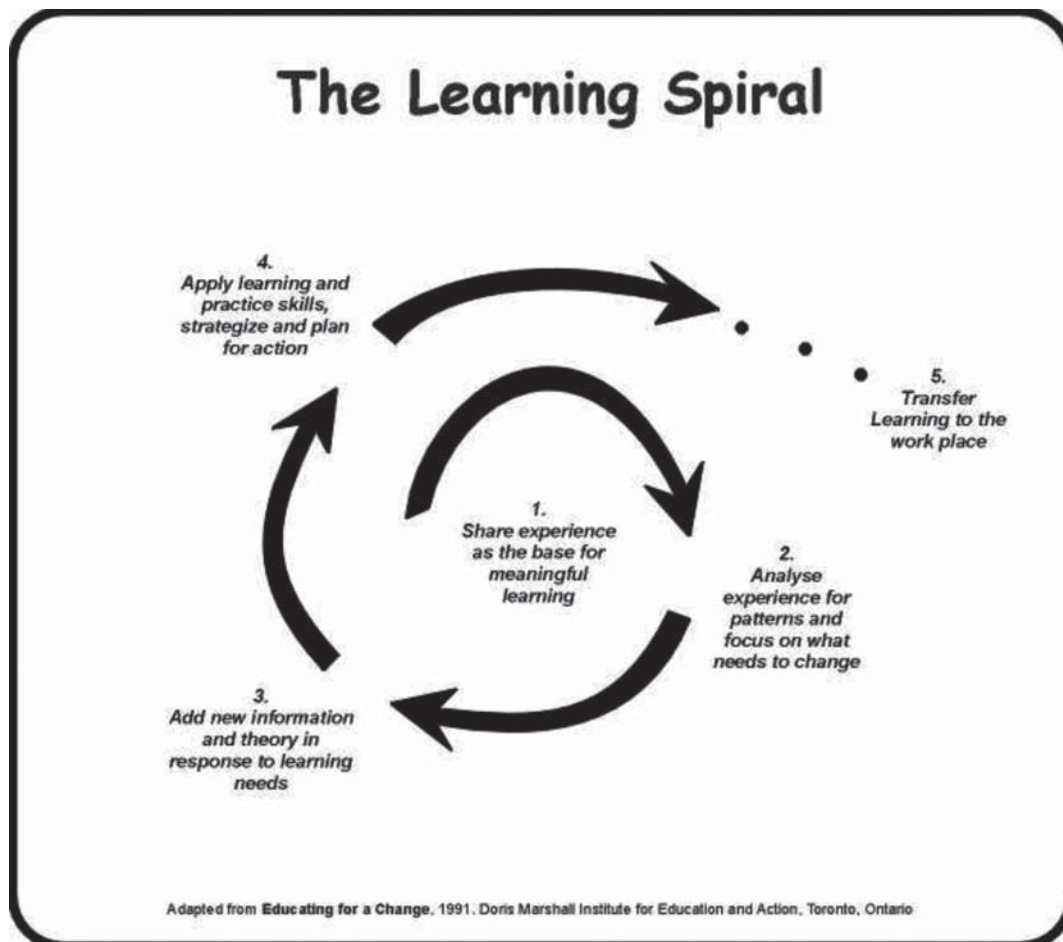
Deskripsi

15 menit

Setelah menyelesaikan Bagian Pembukaan, diskusikan manfaat apa saja yang diperoleh dari modul tersebut. Pertanyaan untuk dipertimbangkan:

1. Masalah-masalah apa yang telah dibahas yang paling relevan dengan pekerjaan sehari-hari di dalam lembaga?
2. Apa perbedaan dari berbagai metode dan teknik pendidikan HAM yang telah digunakan? Apakah metode dan teknik tersebut efektif?
3. Bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dapat diadaptasikan dalam tugas-tugas keseharian?

Lembar Rujukan Spiral Belajar



1. **Mulai dengan pengalaman peserta.** Proses belajar dimulai dari pengalaman dan pengetahuan peserta.
2. **Mencari pola.** Setelah peserta membagi pengalaman mereka, mereka menganalisis pengalaman tersebut dan mencari pola-polanya (misalnya, apa persamaannya? Seperti apa polanya?).
3. **Menambahkan informasi dan teori baru.** Guna memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta, informasi dan teori baru yang diperoleh dari para pakar serta ide-ide baru yang diperoleh secara kolektif, ditambahkan.
4. **Mempraktikkan strategi dan rencana aksi baru.** Para peserta perlu mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari – mempraktikkan keahlian baru, mengembangkan strategi, serta membangun rencana aksi.
5. **Melakukan aksi.** Setelahnya (biasanya ketika mereka kembali pada pekerjaan rutinnnya) mereka mengaplikasikan hal-hal yang telah mereka pelajari.

Lembar Rujukan

Mengenal pendekatan partisipatif

Hal-hal Yang Dipercayai tentang Bagaimana Orang Belajar

Orang belajar lebih efektif ketika:

- kapasitas dan pengetahuan mereka sendiri dihargai
- mereka bisa berbagi dan menganalisa pengalaman mereka dalam lingkungan yang aman secara bersama-sama
- mereka merupakan peserta yang aktif dalam proses belajar

Beberapa asumsi mengenai Peristiwa Belajar (program, pelatihan, lokakarya)

- Kebanyakan kandungannya berasal dari peserta – agenda atau program menyediakan kerangka kerja untuk menampilkan kandungan ini.
- Peserta membawa analisa dan pengalaman kepada program
- Peserta bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri serta interaksi dengan peserta lain
- Setiap orang akan berpartisipasi sepenuhnya dalam sesi-sesi
- Akan ada toleransi terhadap berbagai perbedaan dalam pendekatan serta strategi.

Beberapa Asumsi Pendidik/fasilitator

- Kita tahu lebih sedikit dibandingkan peserta dalam program kita, tentang konteks sosial mereka.
- Siapakah kita telah dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman dan sudut pandang kita
- Kita membawa pengetahuan tentang teori dan praktik tentang pendidikan partisipatif dan akan menyumbangkannya secara sesuai

Modul 1

Pentingnya Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran HAM Bagi Anggota Legislatif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pengantar

Modul ini membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pembahasan mengenai konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sangat penting agar kita dapat memahami apa sebenarnya hak asasi manusia itu dan gagasan dasarnya. Dengan memahami konsep hak asasi manusia, dapat diketahui mengapa itu penting untuk dipahami oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengapa para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melaksanakannya dalam tugas-tugasnya.

Modul ini akan menjelaskan konsep hak asasi manusia yang pada dasarnya berkaitan dengan gagasan dasar bahwa hak asasi manusia dipunyai oleh manusia semata-mata karena dirinya manusia yang bermartabat. Artinya, pertama hak asasi manusia dimiliki oleh manusia semata karena dirinya manusia dan kedua hak asasi manusia dimiliki agar manusia dapat hidup dengan bermartabat. Di sisi lain, tanpa hak asasi manusia, maka manusia akan kehilangan kediriannya sebagai manusia dan martabatnya sebagai manusia akan pula berkurang. Dalam hal ini, hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia yang selanjutnya menjadi sang pemegang hak (*rights holder*). Oleh karena ada yang memiliki hak, maka ada pula pihak yang kemudian memangku kewajiban untuk memenuhi pelaksanaan hak asasi manusia tersebut. Konsep hak asasi manusia modern yang berakar pada teori kontrak sosial menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*).

Modul ini selanjutnya akan menjelaskan kewajiban apa yang dipunyai oleh Negara dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia. Negara memiliki tiga jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Berkaitan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, akan dijelaskan dalam modul ini, kewajiban tersebut tidak bersifat segera namun secara bertahap. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban untuk mencapai hasil tertentu (*obligation of result*).

Sampai saat ini batasan mengenai hak asasi manusia belum dapat kita temukan dalam khsanah hukum hak asasi manusia internasional secara definitif. Oleh karena itu guna memahami konsep hak asasi manusia kemudian menjadi penting untuk memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kita dapat memahami apa itu sebenarnya hak asasi manusia secara lengkap. Modul ini akan menjelaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita temukan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM):: a). Prinsip tak dapat dicabutnya (*inalienable*) hak asasi manusia; b). Prinsip Kesetaraan dan Non-diskriminasi; c). Prinsip Tak Terbagi (*Indivisible*), Saling Bergantung (*Interdependent*) dan Saling Berhubungan (*Inter-related*); d). Prinsip Universal hak asasi manusia. Dengan memahami konsep dan prinsip hak asasi manusia serta kewajiban negara, maka kita akan dapat memahami mengapa hak asasi manusia harus dilaksanakan dalam tugas-tugas sebagai anggota dewan perwakilan rakyat dan bagaimana pelaksanaannya sehingga tidak melanggar prinsip-prinsipnya.

Tujuan Modul

1. Peserta memahami konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia
2. Peserta memahami kewajiban negara dalam hak asasi manusia
3. Peserta memahami kewajiban anggota legislatif dalam hak asasi manusia

Kegiatan

- | | | |
|---------------|--|-----------|
| 1. Kegiatan 1 | Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip HAM | 60 menit |
| 2. Kegiatan 2 | Bedah Kasus: Memahami Kewajiban Negara dalam HAM | 120 menit |
| 3. Kegiatan 3 | Analisis situasi HAM di Provinsi NAD | 120 menit |

Bahan belajar

1. Kartu meta plan
2. Potongan Pasal-pasal DUHAM
3. Lembar Studi Kasus
4. Ringkasan Prinsip-prinsip HAM
5. Metaplan
6. Spidol dan Marker
7. Flipchart

Rujukan

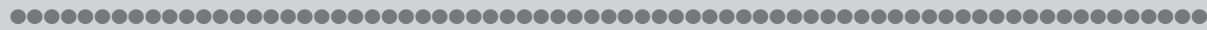
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
3. Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
4. Lembar Fakta 02, Komnas HAM
5. Komentar Umum No. 3 Kovenan hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya tentang Sifat PBB
6. Komentar Umum No 31, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Sifat Kewajiban Negara

Catatan Untuk Fasilitator

Modul ini merupakan modul paling dasar yang menjelaskan konsep dan definisi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Tujuan utama dari aktivitas “menemukan hak asasi manusia dan prinsip-prinsipnya” adalah memastikan peserta mampu merefleksikan pengalaman hidup mereka, hasil observasi mereka terhadap kehidupan di sekitar mereka dan mendorong mereka mengekspresikan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia.

1. Ajak peserta untuk mempelajari dan menerapkan kegiatan yang telah disebutkan dalam manual
2. Catat hal-hal yang penting dari proses diskusi tersebut dan diskusikan lebih lanjut.
3. Fasilitator dapat mencatat sejumlah dilema, perdebatan, dan kontroversi dalam perkembangan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun internasional dan mengajak peserta untuk mendiskusikannya lebih lanjut, misalnya hak hidup – hukuman mati, hak untuk tidak disiksa – kondisi penjara dan tahanan, hak anak – pekerja anak, dsb.

4. Ajak peserta untuk menyimak isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Diskusikan pula konsep limitasi, derogasi, sifat-sifat hak, baik sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Tayangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan gali lebih lanjut pengetahuan dan pengalaman peserta berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut.



Kegiatan 1 Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip HAM⁵

Tujuan

- a. Peserta memahami hak-hak yang tercantum dalam DUHAM
- b. Peserta memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam DUHAM
- c. Peserta memahami posisi negara dalam hak asasi manusia

Waktu

30 menit

Deskripsi

30 menit Simulasi tentang nilai dan prinsip HAM

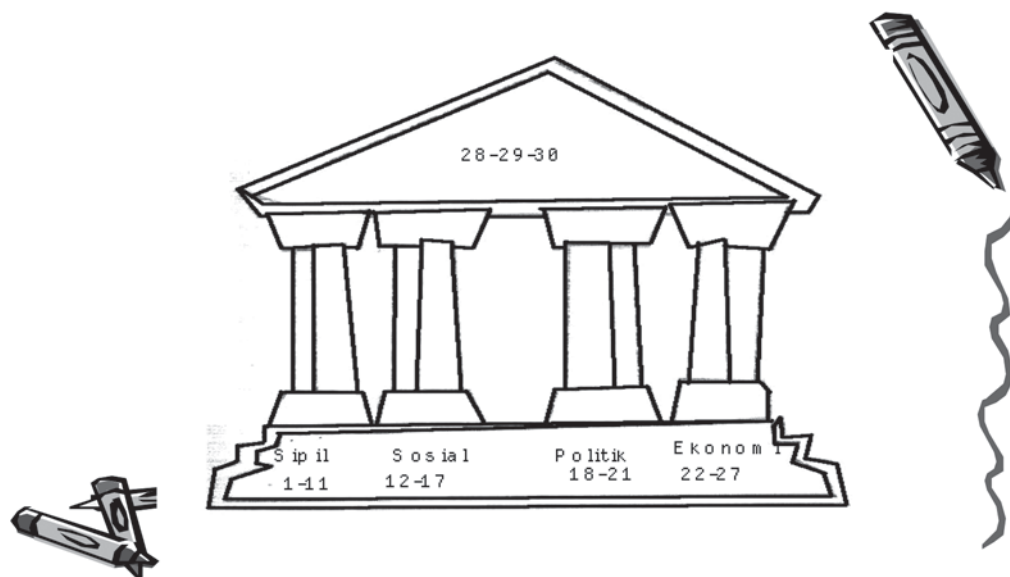
1. Minta peserta saling berhadapan-hadapan dan membentuk lingkaran luar dan lingkaran dalam
2. Minta kepada mereka untuk mendiskusikan apa hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dengan orang yang ada di hadapannya. Peserta bergeser dan melakukan lagi hal yang sama dengan orang yang ada di hadapannya.
3. Bagikan kartu-kartu berisi potongan pasal-pasal dalam DUHAM
4. Di kartu-kartu meta plan yang dibagikan, tuliskan Pasal berapa dari DUHAM dan tuliskan pula hak apa yang diatur
Contoh: Pasal 5 – hak untuk tidak disiksa
5. Minta kepada peserta untuk menemukan ketentuan DUHAM yang mengatur prinsip-prinsip hak asasi manusia:
 - a. Prinsip tak dapat dicabutnya (*inalienable*)
 - b. Prinsip kesetaraan dan non diskriminasi
 - c. Prinsip tak terbagi (*indivisible*), saling bergantung, (*interdependent*) dan saling berhubungan (*inter-related*)
 - d. prinsip universal hak asasi manusia

⁵ Kegiatan ini diolah dari "Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia: 24 Latihan aktif bagi Fasilitator dan pengajar", Komnas HAM, 2001

4. Mintalah kepada setiap orang untuk membaca kartu-kartu mereka. Tanyakan hak apa yang diatur dalam kartu tersebut, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial atau budaya

30 menit Diskusi Kelas

5. Kelompokkan jawaban-jawaban peserta ke dalam kelompok sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Buat dalam gambar, kemudian jelaskan maksud gambar tersebut.



Sumber: Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, 2001, hal. 86

6. Lakukan analisis bersama tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip HAM dan ajak peserta mendiskusikan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Rujuk sejumlah Instrumen pokok hak asasi manusia.

Catatan Untuk Fasilitator

Kegiatan ini menuntut kemauan dan kemampuan memeriksa instrumen-instrumen pokok hak asasi manusia yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Sebelum memulai kegiatan 2, pastikan

1. peserta mengenal Instrumen-instrumen pokok hak asasi manusia; sekurang- kurangnya
 - Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR),
 - Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
 - Kovenan Internasional hak ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR),
 - Konvensi Anti Penyiksaan (CAT),
 - Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD),
 - Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW),
 - Konvensi hak Anak (CRC).

2. Fasilitator dapat menjelaskan secara singkat konsep “kewajiban negara” (*state obligation*) dan 3 (tiga) kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ajak peserta menyimak *hand-out* yang telah disediakan berkaitan dengan konsep kewajiban negara.
3. Jelaskan pula konsep pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM *by commission* maupun pelanggaran *by omission* – diskusikan lebih lanjut dalam bedah kasus



Kegiatan 2 Memahami Kewajiban Negara Dalam Hak Asasi Manusia⁶

Tujuan

1. Peserta memahami posisi negara dalam hak asasi manusia
2. Peserta memahami kewajiban negara dalam hak asasi manusia
3. Peserta memahami kewajiban legislator dalam hak asasi manusia

Waktu

120 menit

Deskripsi

30 menit Bagian A Tugas Individual

1. Berikan penjelasan singkat mengenai posisi negara dalam hak asasi manusia sebagai pemangku kewajiban dan jelaskan kewajiban negara dalam bidang hak asasi manusia: penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia
2. Bagi peserta dalam tiga kelompok: kelompok penghormatan, perlindungan dan pemenuhan
3. Minta peserta untuk menggambar pelaksanaan kewajiban negara pada kartu tersebut dan pelanggaran atas kewajiban tersebut di baliknya.
4. Bagi kasus “Cerita Asni” dan baca kasus tersebut dan isilah kolom di bawah ini:

⁶ Kegiatan, contoh kasus dan hand ot mengenai kewajiban negara diolah dari “Module 5: Links to Human Rights Obligation”, Dignity International

Kewajiban negara	Identifikasi pelaksanaan atau pelanggaran negara dalam kasus tersebut
Penghormatan	
Perlindungan	
Pemenuhan	

30 menit Bagian B Diskusi bersama

1. Mintalah kepada setiap kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kelompok
2. Mintalah kepada narasumber untuk memberi komentar mengenai temuan pelaksanaan kewajiban dan pelanggaran hak asasi manusia
3. Berdasarkan kasus di atas, narasumber menjelaskan tiga jenis kewajiban negara (penghormatan, perlindungan dan pemenuhan) serta mengenai kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban atas hasil (*obligation of result*)
4. Berdasarkan hasil diskusi kelompok mengenai kasus tersebut, narasumber menjelaskan juga mengenai kewajiban legislator dalam hak asasi manusia

60 menit Bagian C Paparan dan diskusi narasumber

5. Fasilitator mengundang peserta untuk berdiskusi dengan narasumber
6. Minta Narasumber menjelaskan bagaimana penerapan kewajiban negara dalam perlindungan dan pemajuan HAM dalam sistem hukum domestik

Catatan Untuk Fasilitator

Akumulasi konflik di Aceh memiliki akar politik yang sangat dalam dan merentang sepanjang sejarah Aceh. Selama bertahun-tahun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami konflik berkepanjangan antara pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (RI). Konflik yang tak berujung ini terjadi selama hampir 30 tahun dan telah mengakibatkan banyak korban dari masyarakat sipil.

Belum terselesaikan konflik panjang yang melanda Aceh dengan dampak yang ditimbulkan, pada akhir tahun 2004, tepatnya tanggal 26 Desember 2004, musibah besar gempa dan gelombang tsunami menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh dan merenggut ratusan ribu penduduk di 6 kabupaten lainnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan ratusan ribu korban yang selamat harus kehilangan harta benda juga tempat tinggalnya. Setelah penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) damai antara pihak GAM dan pemerintah RI, kehidupan masyarakat Aceh secara berangsur-angsur kembali pada titik normal. Kesepakatan damai yang dibangun di Helsinki

mengharapkan bahwa pertikaian akan mereda dan dapat diubah menjadi kegiatan pembangunan bersama (melalui proses pemberian kompensasi, integrasi, dan proses rekonstruksi terpadu).

Berbagai kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam merespon dan menyelesaikan konflik Aceh. Kebijakan yang dianggap solusi bagi Aceh adalah diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).¹ UU Otsus ini melengkapi UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh; (1) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan beragama dengan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya; (2) keistimewaan dalam menyelenggarakan pendidikan; (3) keistimewaan dalam menyelenggarakan kehidupan adat; dan (4) keistimewaan menempatkan peran ulama dalam penetapan kebijakan. Berdasarkan kedua undang-undang pokok soal Aceh itulah, otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai qanun sebagai aturan derivatifnya.

Kegiatan berikut ini akan menjadi alas bagi pembahasan berikutnya karena merupakan peta masalah berkaitan dengan tantangan dan peluang HAM di provinsi NAD baik terkait dengan kondisi-kondisi masa lalu maupun kondisi terkini. Tujuan kegiatan berikut ini adalah mendorong peserta untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai kondisi aktual dan kontekstual di provinsi NAD dan merefleksikan peran yang dapat dilakukan sebagai anggota legislatif. Kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Bagilah kelompok masing-masing 4 atau 5 orang dan mintalah tiap kelompok menganalisis situasi HAM di Aceh dalam 5 tahun terakhir. Gunakan lembar kerja yang telah disediakan untuk menuntun diskusi
2. Fasilitator dapat menyediakan sejumlah rujukan media atau guntingan berita yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peserta. Bisa juga peserta melakukannya dalam kelompok dan mendiskusikan poin-poin yang dipaparkan dalam lembar kerja.
3. Mintalah peserta juga merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan MOU Helsinki sebagai acuan untuk melihat basis perkembangan kekinian di Provinsi NAD.
4. Tiap kelompok mempresetasikan hasil diskusinya dan berilah feedback dari hasil diskusi tersebut. Catat poin-poin penting yang harus didiskusikan lebih lanjut bersama narasumber.



Kegiatan 3 Analisa Situasi HAM di Provinsi NAD

Tujuan

1. Peserta mampu mengenali peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan penegakan maupun pelanggaran HAM di Provinsi NAD selama beberapa tahun terakhir
2. Peserta mampu mengenali faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa-peristiwa tersebut dan aktor-aktor yang berperan di dalamnya.
3. Peserta mampu merefleksikan peran yang dapat dilakukan oleh anggota Legislatif dalam penegakan dan pemajuan HAM di provinsi NAD
4. Peserta dapat mengenali hal-hal pokok yang menghalangi dan mendukung pelaksanaan hak asasi manusia di Aceh.

Waktu

120 menit

Deskripsi

45 menit **Bagian A Diskusi Kelompok Kecil**

1. Fasilitator menyampaikan tujuan sesi dan meminta peserta menganalisis situasi HAM di provinsi NAD mengacu pada pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja yang dibagikan
2. Fasilitator meminta peserta mendiskusikannya dalam kelompok poin-poin yang terdapat di dalam lembar kerja.

75 menit **Bagian B Diskusi Kelompok Pleno**

1. Fasilitator mengundang peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecil di dalam pleno
2. Fasilitator mengundang peserta dari kelompok lain untuk memberi komentar dan umpan balik dari hasil presentasi kelompok diskusi.
3. Fasilitator meminta narasumber atau mentor untuk ikut serta dalam proses diskusi dan memberikan pandangan dan keahliannya terhadap proses dan materi yang dibahas dalam diskusi.

Catatan Untuk Fasilitator

Pada kegiatan 2 Modul 2, fasilitator dapat mengajak forum untuk menggali lebih dalam hasil diskusi itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan:

1. Cara-cara positif yang mungkin dilakukan oleh peserta sebagai anggota legislatif untuk melakukan perubahan situasi dengan kecenderungan dan pola yang muncul dari peta situasi yang disimpulkan dari hasil diskusi di atas?
2. Apa manfaat terdekat dan ke depan yang paling mungkin terasa bagi masyarakat Aceh bila situasi di atas dapat diubah?
3. Bagaimana bingkai yang lebih luas dari konteks yang ada di tingkat nasional dan internasional.
4. Apa yang telah tercapai dan masih perlu dimajukan di Aceh berkenaan dengan penegakan HAM? Bagaimana aktor-aktor dan lembaga-lembaga demokrasi dan hak asasi manusia, serta masyarakat sipil berperan dalam proses demokratisasi dan pelaksanaan hak asasi manusia?
5. Bagaimana perdamaian yang terjadi di Aceh dapat memberi kekuatan baru bagi Aceh untuk bangkit kembali? Apa kekuatan utamanya dan bagaimana membangun kembali kepercayaan diri masyarakat pasca konflik? Bagaimana refleksi terhadap proses perdamaian di Aceh? Apa tantangan-tantangannya dan bagaimana prospeknya bagi pembangunan kembali masyarakat Aceh ke depan? Bagaimana peran kelompok masyarakat sipil, terutama perempuan dan korban dalam proses perdamaian tersebut?
6. Apa peluang-peluang yang tersedia bagi korban dalam proses perdamaian dan pembangunan kembali Aceh? Bagaimana peluang Komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pengadilan HAM, dan reparasi bagi para korban?

Debriefing / Evaluasi

Tujuan

1. Peserta memahami tujuan modul 1
2. Peserta mampu merefleksikan proses yang dilakukan dalam modul 1 dalam pekerjaan sehari-hari

Waktu

10 menit

Deskripsi

15 menit

Setelah menyelesaikan Modul 1, diskusikan manfaat apa saja yang diperoleh dari modul tersebut. Pertanyaan untuk dipertimbangkan:

1. Masalah-masalah apa yang telah dibahas yang paling relevan dengan pekerjaan sehari-hari di dalam lembaga?
2. Apa perbedaan dari berbagai metode dan teknik pendidikan HAM yang telah digunakan? Apakah metode dan teknik tersebut efektif?
3. Bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dapat diadaptasikan dalam tugas-tugas keseharian?

Lembar Kerja

Analisis Peta Situasi Aceh

<p>1. Identifikasi 3 masalah yang <u>paling memprihatinkan</u> DPRA/DPRK di masyarakat Aceh saat ini</p>	<p>a. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat pada setiap ragam tipe persoalan tersebut di atas? (ini misalnya saja: birokrat, polisi, tentara, kelompok masyarakat sipil, orang tua, orang dewasa, dll).</p> <p>b. Siapa saja pihak-pihak yang memperkuat situasi ini terjadi? Ini misalnya saja: orang tua, para birokrat, pemimpin agama, dll.</p> <p>c. Dimana saja persoalan ini muncul? Misalnya saja: rumah, tempat penahanan, ruang tahanan polisi, sekolah, pusat-pusat pendidikan agama-agama tertentu, dll.</p> <p>d. Siapa korban (pihak yang paling merasakan langsung) persoalan ini? Misalnya saja: perempuan, anak-anak, pekerja, rakyat miskin, dan masyarakat sipil lainnya, dll.</p> <p>e. Apa faktor-faktor penyebab? Misalnya: ada kekebalan hukum bagi orang-orang tertentu (impunity), dominasi kelompok tertentu, kepercayaan dan (atau) keyakinan tertentu, distribusi atau penyebaran sumberdaya yang tidak merata, interes politik tertentu, ketidaksetaraan dalam masyarakat (karena perbedaan kelamin, budaya, suku, agama, pandangan politik, dll).</p>
<p>2. Apa kemungkinan peluang intervensi DPRA untuk penyelesaian masalah di atas? (Misalnya: untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, pilihan intervensi yang dapat dilakukan adalah antara lain: (a) pendidikan untuk kaum lelaki; (b) pemberdayaan kaum perempuan; (c) memperkuat system keadilan bagi perempuan korban kekerasan; (d) advokasi dan lobby, membangun kepedulian, (e) membangun kepekaan social, (f) mengubah peraturan yang tidak berpihak kepada rakyat Aceh, (g) mengubah pelaksanaan kebijakan anggaran, dll.</p>	<p>Apa keterbatasan DPRA untuk melakukan intervensi atau melakukan perubahan situasi di atas? (Misalnya, (a) keterbatasan anggaran, (b) peraturan perundang-undangan yang tidak membatasi, (c) prasangka budaya, atau tafsiran agama, (d) tidak tersedia kehendak baik dari pemerintah (political will), dll.</p>
<p>Apa peluang yang tersedia untuk melakukan intervensi atau perubahan? Misalnya saja: sumber daya lokal, produk hukum, jaringan kerja dengan institusi atau organisasi lainnya, lobby-lobby politik di tingkat lokal, nasional, sampai dengan internasional, dll.</p>	

Lembar Rujukan

Ringkasan Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Hak untuk kesetaraan</i> ● <i>Kebebasan dari diskriminasi</i> ● <i>Hak untuk kehidupan, kemerdekaan, keamanan pribadi</i> ● <i>Kebebasan dari perbudakan</i> ● <i>Kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan yang menurunkan derajat</i> ● <i>Hak untuk pengakuan sebagai seseorang di hadapan hukum</i> ● <i>Hak untuk persamaan di hadapan hukum</i> ● <i>Hak untuk perbaikan dengan pengadilan yang kompeten</i> ● <i>Kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang, pengasingan</i> ● <i>Hak untuk dengar pendapat yang adil</i> ● <i>Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah</i> ● <i>Kebebasan dari campur tangan dalam privasi, keluarga, rumah, dan korespondensi</i> ● <i>Hak untuk bergerak bebas masuk dan keluar dari negara manapun</i> ● <i>Hak untuk suaka di negara-negara lain dari penyiksaan</i> ● <i>Hak untuk kewarganegaraan dan kebebasan untuk merubahnya</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Hak untuk menikah dan berkeluarga</i> ● <i>Hak untuk memiliki harta benda</i> ● <i>Kebebasan mempunyai kepercayaan dan agama</i> ● <i>Kebebasan berpendapat dan informasi</i> ● <i>Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai</i> ● <i>Hak untuk berpartisipasi di pemerintahan dan pemilihan umum yang bebas</i> ● <i>Hak untuk keamanan sosial</i> ● <i>Hak untuk pekerjaan yang diinginkan dan untuk bergabung dalam serikat dagang</i> ● <i>Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang</i> ● <i>Hak untuk standar hidup yang memadai</i> ● <i>Hak untuk pendidikan</i> ● <i>Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan komunitas budaya</i> ● <i>Hak untuk tata sosial yang memastikan hak asasi manusia</i> ● <i>Tugas-tugas komunitas yang sangat penting bagi pembangunan bebas dan penuh</i> ● <i>Kebebasan dari campur tangan negara dalam urusan-urusan pribadi</i>
---	--

Lembar Rujukan

Definisi-Definisi Hak Asasi Manusia

(Dikutip dari : 2007, *International Human Rights Training Programs, Equitas*)

1. “Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan ... yang setiap orang punya dari saat lahir, hanya karena mereka adalah manusia. Hak asasi manusia bukan hak istimewa, yang perlu dimenangkan, dan hak asasi manusia berlaku sama untuk setiap orang, tanpa mempedulikan usia, jenis kelamin, ras, etnik, kekayaan atau kedudukan sosial. Karena hak asasi manusia adalah hak, hak asasi manusia tidak bisa diambil dari siapapun oleh pemerintah (walaupun bisa dibatasi dan terkadang ditangguhkan selama keadaan darurat).

Sangat penting untuk mengingat bahwa hak ini milik siapa saja. Ini berarti orang-orang punya tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Juga, hak ini tidak menggantikan hukum yang kita punya, dan jadi orang-orang harus menghormati hukum juga. Contohnya, fakta bahwa Saya punya hak untuk mengikuti kebiasaan saya sendiri bukan berarti saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Saya harus memastikan dalam mengikuti kebiasaan saya bahwa saya tidak menyalahi hak siapapun.”

Manual Lokakarya Membangun Budaya Hak Asasi Manusia,
South African Human Rights Commission
British Council and Humanitas Educational

2. “Hak asasi manusia biasanya dipahami sebagai hak yang melekat pada manusia. Konsep hak asasi manusia mengakui bahwa setiap satu manusia berhak untuk menikmati hak asasi manusianya tanpa perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul nasional atau sosial, harta benda, kelahiran atau status lain. Hak asasi manusia dengan sah dijamin oleh hukum hak asasi manusia, yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan-tindakan yang mencampuri kebebasan mendasar dan martabat manusia.”

Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, OHCHR,
UN Staff College Project 1999 hal. 3

3. “Konsep hak asasi manusia muncul dari pemikiran manusia modern mengenai sifat keadilan; konsep ini tidak muncul dari suatu konsensus yang berdasarkan antropologi mengenai nilai, kebutuhan, atau hasrat manusia. Seperti yang dikatakan Jack Donnelly, konsep hak asasi manusia paling baik diinterpretasikan oleh teori konstruktivis:

Hak asasi manusia bertujuan menetapkan dan menjamin kondisi-kondisi yang penting bagi perkembangan manusia yang diimpikan dalam ...[satu] teori moral pokok [yang khusus] mengenai sifat manusia, dengan demikian mewujudkan tipe orang itu.... Evolusi konsepsi-konsepsi atau daftar-daftar khusus mengenai hak asasi manusia dilihat dalam teori konstruktivis sebagai akibat dari interaksi timbal-balik konsepsi moral dan kondisi bahan kehidupan, yang dikandung melalui institusi-institusi sosial seperti hak.

Hak asasi manusia cenderung menjadi khususnya karakteristik masyarakat liberal dan/atau sosial demokratis [...]. Hak asasi manusia tunduk kepada manusia berdasarkan manusia, dan tidak untuk alasan lain [...].

Hak asasi manusia, lalu, adalah ungkapan khusus martabat manusia. Di kebanyakan masyarakat, martabat tidak mengisyaratkan hak asasi manusia. Ada sedikit pondasi budaya – apalagi universal – untuk konsep tersebut, bertentangan dengan isinya, hak asasi manusia. Masyarakat yang dengan aktif melindungi hak dalam hukum maupun pada prakteknya merupakan suatu keberangkatan yang radikal untuk masyarakat manusia yang paling terkenal [...].”

*Rhoda Howard, Dignity, Community and Human Rights
Dalam Abdullahi An-Na'im (ed.), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives 81 (1992)*

Lembar Rujukan

“CERITA ASNI”

Asni, suaminya dan tiga anak mereka hidup di sebuah desa. Asni sekeluarga merupakan anggota sebuah masyarakat adat yang merupakan kelompok minoritas di propinsi tersebut. Asni sekeluarga memiliki sebidang tanah dimana mereka bertanam padi dan sayur mayur. Asni tidak begitu bisa membaca sementara suaminya hanya lulusan SD. Pada 1986, pemerintah menggusur Asni sekeluarga dan beberapa keluarga petani kecil lain di desa itu untuk membangun perkebunan buah-buahan dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Kebijakan itu merupakan bagain dari kebijakan yang disponsori Bank Dunia. Pemerintah membayar ganti rugi bagi keluarga yang tergusur. Namun, karena mereka petani kecil dari kelompok masyarakat adat dengan pendidikan rendah, mereka tidak mampu meminta ganti rugi tinggi.

Suami Asni menggunakan uang ganti rugi untuk biaya perkawinan adik perempuannya. Uang itu juga dipakai untuk membeli perhiasan untuk Asni serta baju untuk keluarga. Habislah uang itu. Pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mencarikan pekerjaan pengganti bagi mereka yang tergusur. Tanpa uang atau tanah, keluarga Asni memutuskan pindah ke Jakarta. Asni mendapat pekerjaan sebagai tenaga kebersihan di sebuah perusahaan. Asni dibayar di bawah UMR. Pekerja laki-laki dibayar lebih tinggi untuk pekerjaan yang sama. Perusahaan tidak mengizinkan adanya serikat pekerja didirikan.

Suami Asni mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan multi nasional yang memproduksi sepatu untuk ekspor. Pekerja dibayar di bawah UMR dan tidak mendapat asuransi atau jaminan sosial. Kebijakan pemerintah tidak mengizinkan dibentuknya serikat pekerja pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang ekspor.

Asni sangat menginginkan anak-anaknya untuk dapat sekolah. Namun, tidak ada SD negeri dekat tempat tinggal mereka. Akhirnya anak-anaknya sekolah di sebuah SD swasta dengan uang SPP yang mahal. Keluarga Asni tinggal di sebuah rumah kontrakan kumuh tanpa air bersih dan sanitasi. Anak perempuannya kemudian terjangkit malaria. Anak laki-lakinya terjangkit disentri. Keluarga Asni harus mengeluarkan biaya pengobatan tinggi yang terus-menerus. Untuk menutup pengeluaran itu, Asni dan suaminya meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi yang dibayar dengan gaji bulanan mereka.

Pada 1997, terjadi krisis moneter yang mempengaruhi ekonomi negara. Perusahaan sepatu multi nasional tempat suami Asni bekerja tutup dan pindah ke negara lain. Perusahaan tempat Asni bekerja juga mengurangi produksinya dan melakukan PKH pegawai. Asni kehilangan pekerjaannya. Asni dan suaminya tidak punya asuransi apa pun. Anak-anak mereka akhirnya tidak sekolah lagi. Anak perempuannya menjadi cacat karena tidak ada pengobatan dan kurang makanan bergizi. Tanpa pekerjaan, mereka tak dapat membayar kontrakan mereka. Keluarga Asni diusir dari rumah kontrakan dan akhirnya hidup di pinggiran jalan.

Lembar Rujukan

Kewajiban Negara dalam Perlindungan dan Pemajuan HAM

Kewajiban Negara

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 28I

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Lembar Rujukan

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia

(Dikutip dari : 2007, *International Human Rights Training Programs, Equitas*)

Kesetaraan (Equality)

Konsep kesetaraan mengekspresikan bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap keberadaan setiap manusia di muka bumi. Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kesetaraan merupakan dasar hak asasi manusia: "Setiap manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak dan martabat yang sama."

Non-diskriminasi (Nondiscrimination)

Non-diskriminasi merupakan bagian integral dari konsep kesetaraan. Konsep non-diskriminasi menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai manusia dari segala faktor yang bersifat eksternal. Berdasarkan perjanjian internasional, faktor-faktor eksternal yang dapat memicu pelanggaran dan diskriminasi dalam HAM, antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan kepercayaan, pandangan politik, latar belakang sosial dan kewarganegaraan, kepemilikan, kelahiran, serta status lainnya. Namun demikian, daftar diatas hanya merupakan sebagian contoh – tidak berarti bahwa di luar daftar tersebut, diskriminasi terhadap hak manusia dapat dilegalkan dengan alasan apapun.

Tanggung jawab pemerintah: HAM bukanlah hadiah pemberian dari pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah tidak berhak menahan maupun memberikan hak tersebut hanya pada sebagian warga negaranya saja. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak warga negaranya serta bersikap akuntabel dan terbuka mengenai implementasi HAM.

Tanggung jawab (Responsibility)

Tanggung jawab individu: Setiap individu bertanggung jawab untuk mengajarkan mengenai HAM, untuk menghormatinya, serta untuk menantang institusi dan individu yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Pihak lain yang bertanggung jawab: setiap lapisan masyarakat – termasuk perusahaan, LSM, institusi dan yayasan pendidikan – juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM

Tidak dapat direnggut (Inalienability)

Hak yang dimiliki oleh setiap individu tidak dapat diambil, ditahan, atau dipindahtangankan

Universalitas (Universality)

Terdapat nilai moral dan etika tertentu di setiap belahan dunia. Pemerintah dan masyarakat harus mengakui dan mendukung keberadaan nilai-nilai tersebut. Namun demikian, implementasi prinsip universalitas hak tidak serta merta mengharuskan setiap individu untuk merubah nilai moral dan etika mereka agar menjadi seragam dengan orang lain.

Harkat dan martabat (Human dignity)

Prinsip HAM didasarkan pada pemahaman bahwa setiap orang berhak mendapat penghormatan atas harkat dan martabat mereka tanpa perbedaan berdasarkan usia, budaya, kepercayaan, latar belakang etnis, ras, gender, orientasi seksual, bahasa, kekurangan fisik, maupun strata sosial.

Tidak dapat dibagi-bagi (Indivisibility)

Hak asasi harus dipandang sebagai satu kesatuan tak terpisah, termasuk diantaranya hak sebagai warga negara, hak politik, sosial, ekonomi, serta hak kolektif.

Keterkaitan (Interdependency)

Hak asasi dapat ditemui dimana saja – rumah, sekolah, tempat kerja, pengadilan, maupun pasar. Pelanggaran terhadap hak seseorang mempengaruhi hak orang lain. Sebaliknya, promosi hak di satu bidang tertentu berarti memberikan dukungan pada bidang lainnya.

Sumber:

Flowers, N. (2000). *The Human Rights Education Handbook: Effective Practices For Learning, Action, And Change*. Minneapolis, MN: University of Minnesota.

Ravindran, D. J. (1998). *Human Rights Praxis: A Resource Book for Study, Action and Reflection*. Bangkok, Thailand: The Asia Forum for Human Rights and Development.

Lembar Rujukan

Instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi Indonesia			
No.	Instrumen Internasional	International Instrumen	Ratifikasi
1.	Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan	<i>International Convention on the Political Rights of Women</i>	Undang Undang No.68 /1958, tanggal 17 Juli 1958
2.	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan	<i>International Convention on the Elimination all Forms Discrimination Against Women</i>	Undang-Undang No.7/1984, tanggal 24 Juli 1984
3.	Konvensi Internasional tentang Hak Anak	<i>International Convention on the Rights of Child</i>	Keputusan Presiden No.36/1990
4.	Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olahraga	<i>International Convention against Apartheid in Sports</i>	Keputusan Presiden No.48/1993, tanggal 22 Mei 1993
5.	Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia	<i>International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>	Undang-Undang No.5 /1998, tanggal 28 September 1998
6.	Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	<i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i>	Undang-Undang No.29/1999, tanggal 25 Mei 1999
7.	Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	Undang-Undang No.11/2005, tanggal 28 Oktober 2005
8.	Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	Undang-Undang No.12/2005, tanggal 28 Oktober 2005

Lembar Rujukan

Hak Asasi Manusia di Aceh

Hak-hak Asasi Manusia telah dijamin dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang hak-hak yang dijamin bagi setiap warga Aceh dan kewajiban pemerintah terkait dengan pemenuhan hak-hak tersebut. Kunci dari pelaksanaan deklarasi tentang HAM dan berbagai konvensi terletak pada peran besar negara dalam merumuskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mendukung penghargaan terhadap HAM serta mendorong kemampuan setiap individu untuk meningkatkan status ekonomi, sosial, dan budayanya. Kemampuan dan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan berada di tangan eksekutif dan legislatif.

Rincian hak-hak khusus setiap penduduk ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2006:

Pasal 227 ayat (1)

Dalam Pasal ini ditegaskan bahwa setiap penduduk berhak:

- ❖ atas kedudukan yang sama di depan hukum;
- ❖ atas kebebasan berbicara, kebebasan pers dan publikasi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berdemonstrasi secara damai, dan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja dan hak mogok;
- ❖ atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan Syari'at Islam;
- ❖ memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundangundangan;
- ❖ mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, fasilitas melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat hukum untuk perlindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan pengadilan.

Pasal 227 ayat (2)

Dalam pasal ini ditegaskan secara eksplisit bahwa terhadap penduduk tidak dibenarkan untuk:

- ❖ dilakukan semua bentuk penggeledahan sewenang-wenang atau tidak sah atas tubuh, kediaman, pakaian, pencabutan atau perampasan hak, atau pembatasan atas kebebasan setiap orang;
- ❖ dilakukan penyiksaan secara sewenang-wenang dan pencabutan atas hak hidup secara melawan hukum; dan ditangkap, ditahan, diadili, dan dipenjarakan secara melawan hukum.

Pernyataan mengenai kewajiban pemerintah (termasuk Pemerintah Aceh) terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak dapat ditemukan dalam Pasal 231:

- ❖ Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun.

Bilamana terjadi perkara pelanggaran HAM, telah ditetapkan pengaturan tentang penanganannya melalui UU No. 11 Tahun 2006:

Pasal 228:

1. Untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sesudah Undang-Undang ini diundangkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh.
2. Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal 229:

1. Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh.
2. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip adat yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 230:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, penetapan anggota, organisasi dan tata kerja, masa tugas, dan biaya penyelenggaraan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh diatur dengan Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Lembar Rujukan

Kasus Gedung Sekolah Roboh

Bangunan sebuah Sekolah Dasar Negeri yang terletak di sebuah kampung pinggiran kota, kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Bangunan itu sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk jadi tempat belajar-mengajar. Bukan saja karena tidak nyaman. Lebih dari itu, bangunan tersebut sewaktu-waktu dikhawatirkan akan bisa ambruk dan mencelakai para siswa yang sedang belajar di kelas.

Kondisi bangunan yang rusak parah itu sebenarnya sudah berkali-kali dilaporkan kepada pihak yang dipandang berwenang, baik oleh pihak sekolah maupun oleh para orang tua murid yang tergabung dalam Dewan Sekolah. Namun, tidak pernah ada tanggapan dan perhatian dari pihak yang berwenang itu.

Bangunan sekolah itu makin hari makin parah saja kondisinya. Pihak sekolah dan para orang tua murid, sangat was-was kalau bangunan sekolah itu benar-benar ambruk dan mencelakai para siswa. Mereka sempat berembuk untuk mencari jalan keluar agar bisa menyelesaikan masalah itu. Sayangnya, jalan keluar yang diharapkan tak bisa ditemukan.

Pilihan mereka untuk memindahkan tempat belajar-mengajar ke bangunan yang aman, tidak bisa dilakukan karena tidak ada tempat yang bisa memadai untuk menampung para siswa. Begitu pun dengan keinginan mereka untuk memperbaiki bangunan sekolah itu secara swadaya, mengumpulkan sumbangan. Pilihan itu pun tak bisa terpenuhi. Hampir semua orang tua siswa di sana tingkat ekonominya rendah, hidup pas-pasas. Jangankan bisa menyumbang untuk memperbaiki bangunan sekolah yang membutuhkan biaya tidak sedikit; untuk hidup sehari-hari pun mereka sudah kesulitan. Akhirnya, karena anak-anak itu harus tetap bersekolah, dan mereka pun tak punya pilihan lain, bangunan sekolah yang kondisinya sudah rusak parah itu tetap dipakai sebagai tempat belajar-mengajar.

Sampai suatu hari, apa yang dicemaskan itu benar-benar terjadi: bangunan sekolah itu ambruk, mencelakai para siswa yang saat itu sedang belajar di kelas. Banyak siswa yang terluka parah, bahkan sampai ada korban yang meninggal dunia. Sekolah diliburkan selama beberapa hari, kegiatan belajar mengajar dihentikan hingga ada kejelasan mengenai peristiwa yang terjadi, murid-murid terlantar tidak lagi bisa belajar (dei)^{III}

Pertanyaan Diskusi:

- Seandainya saja Anda adalah salah seorang dari orang tua siswa yang menjadi korban bangunan sekolah yang roboh itu, apa yang akan Anda lakukan agar hak-hak siswa untuk mendapatkan pendidikan terpenuhi dan siswa yang mengalami luka-luka akibat gedung yang roboh mendapatkan perawatan yang memadai.
- Seandainya saja pejabat dinas pendidikan atau pihak berwenang yang pernah mendapatkan laporan tentang kondisi bangunan sekolah yang roboh itu, apa yang akan Anda lakukan?
- Seandainya saja Anda adalah anggota Komnas HAM atau lembaga-lembaga negara yang menerima pengaduan pelanggaran HAM, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi kasus robohnya bangunan yang membawa korban para siswa itu?
- Seandainya saja Anda anggota Dewan / Anggota Legislatif yang mendapatkan laporan atau informasi mengenai kasus robohnya gedung sekolah tersebut, apa yang akan anda lakukan untuk memperbaiki situasi pemenuhan hak atas pendidikan di wilayah tersebut.

Modul 2

Mengintegrasikan Pendekatan Berbasis HAM dalam Fungsi-Fungsi Legislatif

Pengantar

Modul ini mendiskusikan pengertian pendekatan berbasis hak (*human rights based approach*), dan penerapannya dalam kebijakan publik. Saat ini, prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak telah menjadi salah satu indikator penting dalam demokrasi. Pendekatan hak asasi manusia telah diterapkan secara meluas dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik dalam perencanaan program aksi maupun ketentuan perundang-undangan.

Pendekatan berbasis hak dibangun atas dasar keyakinan bahwa setiap manusia, karena ia manusia, memiliki seperangkat hak. Oleh karena itu, pendekatan berbasis hak:

- Berasumsi bahwa semua manusia, termasuk anak-anak, harus mendapatkan peluang yang sama untuk mewujudkan potensi perkembangan mereka sepenuhnya.
- Melibatkan proses pemberdayaan bagi mereka yang tidak menikmati haknya untuk mengklaim (mendaku) kembali haknya. Oleh karena itu pendekatan berbasis hak bukanlah semata-mata kegiatan derma atau pengembangan ekonomi yang sederhana saja.
- Memadukan norma-norma, standar, dan prinsip HAM internasional ke dalam rencana, kebijakan, dan proses program pembangunan, program sosial, dan program-program lain.
- Mendukung konsep bahwa semua orang, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku, status sosial, atau segala perbedaan lain, mempunyai hak dasar untuk kehidupan yang bermartabat. Program-program berbasis hak, menangani semua aspek kehidupan manusia (contoh, mulai dari menjamin kehidupan dasar sampai memenuhi kehidupan psikologis). Pendekatan ini bersifat holistik dan inklusif.

Pada prinsipnya, pendekatan berbasis hak mengintegrasikan norma-norma, standar-standar, dan prinsip-prinsip sistem hak asasi manusia internasional dalam perencanaan-perencanaan, kebijakan-kebijakan, dan proses pembangunan.

Norma-norma dan standar adalah yang terkandung dalam khasanah pakta-pakta dan deklarasi-deklarasi internasional. Pendekatan berdasarkan kebutuhan mencari kemungkinan fasilitas negara dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan yang diinginkan, seperti mengubah arah penggunaan anggaran Depkes dari pembangunan Rumah Sakit Swasta menjadi pelayanan kesehatan ibu dan anak di pedesaan. Sementara, pendekatan berdasarkan hak pertama-tama melihat korban-korban pelanggaran HAM dan bagaimana pelanggaran itu terjadi. Selanjutnya dicari cara bagaimana negara menjalankan kewajibannya dalam rangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi mereka yang terlanggar.

Prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak antara lain termasuk kesetaraan, pemerataan hak (kesejahteraan), akuntabilitas, pemberdayaan, dan partisipasi. Dalam pendekatan berbasis hak, pembangunan terdiri atas elemen-elemen berikut, yaitu keterkaitan langsung dengan hak,

Akuntabilitas, Partisipasi, Anti-diskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan, merupakan bentuk upaya pemberdayaan.

Pokok bahasan dalam modul ini mencakup pengenalan dasar pendekatan berbasis hak melalui kemampuan membedakan hak dan kebutuhan. Pokok bahasan lain adalah pengenalan prinsip-prinsip umum pendekatan berbasis hak, yang mencakup pembahasan singkat lima prinsip dasar pendekatan berbasis hak yang telah disebut di atas. Untuk memperdalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip tersebut, modul ini dilengkapi dengan kegiatan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam pengujian suatu kebijakan publik. Selain untuk memperdalam pemahaman akan prinsip-prinsip utama dalam pendekatan berbasis hak, aktivitas tersebut juga mempergunakan pengetahuan akan sifat kewajiban pemegang hak (*right holder*) dan pemangku kewajiban (*duty bearer*) hak asasi yang dipelajari dalam modul sebelumnya.

Modul ini membahas mengenai masalah-masalah umum yang dihadapi dalam menjalankan fungsi DPRD, dan bagaimana prinsip dan norma hak asasi manusia dapat membantu anggota DPRD untuk menghindari atau memperkecil munculnya masalah-masalah tersebut. Pendekatan berbasis hak asasi manusia berorientasi tidak hanya pada output namun juga proses. Karena tujuannya mencakup output dan proses, prinsip-prinsip utama pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat membantu anggota DPRD untuk menghindarkan masalah-masalah umum yang muncul dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan prinsip-prinsip utama pendekatan berbasis hak ini mensyaratkan anggota DPRD juga mempertimbangkan standar dan ketentuan-ketentuan normatif hak asasi manusia yang telah dan sudah diakui oleh negara, baik melalui konstitusi dan ketentuan perundang-undangan yang lain. Penerapan ini dengan sendirinya dapat membantu menjaga kualitas output/keluaran dari implementasi beberapa fungsi DPRD seperti fungsi legislasi dan penganggaran. Sementara itu, penerapan empat prinsip yang lainnya dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan dengan konstituen (prinsip pemberdayaan dan non diskriminasi) dan meningkatkan kualitas proses implementasi fungsi (prinsip partisipasi).

Modul ini juga membahas mengenai manfaat penggunaan daftar periksa untuk menjaga kesesuaian pelaksanaan fungsi dengan prinsip-prinsip utama pendekatan berbasis hak. Oleh karena itu, dalam modul ini juga disusun kegiatan yang dapat membantu peserta untuk menghasilkan daftar periksa yang singkat dan sederhana untuk mengenali masalah-masalah umum yang muncul dalam pelaksanaan fungsi legislasi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak.

Pembelajaran terhadap kedudukan qanun dalam perundang-undangan tidak akan dimulai dari dasar hukum, definisi, ataupun tahapan pembentukan qanun karena diasumsikan anggota legislatif sebagai peserta pelatihan telah memiliki pengetahuan dasar tersebut. Namun yang tidak boleh dilepaskan adalah anggota legislatif perlu memahami dengan baik letak qanun dalam perundang-undangan karena ini akan membantu dalam menentukan isi pasal-pasal serta arah pengaturan yang ada di dalam (qanun). Mengenai peran qanun, diarahkan pada upaya menghadirkan pemahaman bagi peserta pelatihan tentang hukum yang dapat menjadi alat dalam melakukan transformasi sosial. Atau dengan kata lain, keberadaan qanun merupakan produk hukum transformatif, yang memberikan respon (tanggapan) kepada masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai kendala atau hambatan dalam pemenuhan hak sipol dan hak ekosob. Bagian terakhir yaitu konteks perumusan qanun yang berorientasi pada pemenuhan hak sipol dan hak ekosob. Peserta pelatihan akan diinformasikan tentang ruang artikulasi dan agregasi kepentingan serta tindakan atau aksi yang dapat dilakukan diantara tahapan pembentukan qanun yang bertujuan memenuhi hak sipol dan hak ekosob secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Tujuan Modul

1. Peserta memahami pentingnya pendekatan berbasis hak (*human rights based approach*) dalam fungsi-fungsi legislatif.
2. Peserta mampu mengintegrasikan pendekatan berbasis HAM dalam fungsi-fungsi legislatif.

Kegiatan

- | | | |
|--------------|---|-----------|
| • Kegiatan 1 | Memahami Pendekatan Berbasis Hak | 90 menit |
| • Kegiatan 2 | Bedah Qanun: Penerapan Fungsi Legislasi berbasis HAM | 120 menit |
| • Kegiatan 3 | Bedah Kasus: Penerapan Fungsi Penganggaran Berbasis HAM | 120 menit |
| • Kegiatan 4 | Simulasi: Penerapan Fungsi Pengawasan Berbasis HAM | 120 menit |

Catatan Untuk Fasilitator

Pada sesi ini fasilitator perlu menggali pemahaman peserta tentang konsep “pendekatan berbasis hak”. Sesi dimulai dengan menempatkan definisi hak dihadapkan dengan definisi kebutuhan. Ajak peserta mengenali sejumlah konsep baik berupa benda maupun jenis kegiatan dan konsep hak. Menggali pemahaman mereka, manakah yang termasuk hak dan mana yang termasuk kebutuhan.

Sampaikan secara ringkas mengapa perlu memahami perbedaan tersebut dan apa kaitannya dengan pendekatan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik. Pendekatan berbasis hak, tak hanya berorientasi pada hasil tapi juga proses. Berbeda dengan pendekatan lainnya, pendekatan berbasis hak menjadikan output dan proses sebagai tujuannya. Ini tercermin secara jelas dalam lima prinsip utamanya.

1. Gunakan lembar rujukan yang telah disediakan sebagai acuan.
2. Sampaikan kembali lima prinsip utama pendekatan berbasis hak dikaitkan dengan temuan-temuan yang diperoleh dalam kegiatan ini.
3. Perhatikan pertanyaan kunci yang hendak dijawab dari modul ini adalah:
 - ❖ Apakah menurut anda perlu upaya memadukan perspektif HAM terhadap fungsi legislatif? Jika Ya, Apa alasannya? Jika Tidak, apa alasannya?
 - ❖ Bagaimana cara memadukan HAM dengan fungsi legislatif? (Untuk kelas tingkat lanjut dapat dibahas lebih rinci cakupan hak sipol dan ekosob dalam fungsi legislatif)
 - ❖ Identifikasikan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memadukan HAM dalam fungsi legislatif! (ini dapat digunakan untuk pelatihan tingkat lanjut, dengan merinci hak-hak sipol atau ekosob)
 - ❖ Apakah menurut anda diperlukan kerja sama lintas fraksi/lintas komisi? Kalau diperlukan apa yang harus dirundingkan antar komisi/antar fraksi? Hasil-hasil konkrit apa yang perlu dicapai dalam kegiatan lobi tersebut?

Kegiatan 1 Mengenal Pendekatan berbasis Hak (*Rights based approach*) dan elemen-elemennya

Tujuan

1. Peserta mampu mengetahui perbedaan hak dan kebutuhan
2. Peserta mengetahui prinsip-prinsip utama pendekatan berbasis hak
3. Peserta memahami pentingnya pendekatan berbasis HAM dalam fungsi-fungsi legislatif
4. Peserta mampu melakukan analisis kebijakan dengan pendekatan berbasis hak
5. Peserta mampu mengidentifikasi tingkat kesesuaian kebijakan dengan norma hak

Metode

Curah pendapat (*Brainstorming*)
Pemutaran Film
Diskusi

Waktu

90 menit

Deskripsi

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 10 menit | Bagian A | “.... Hak Vs Kebutuhan....” |
| | | <ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator menuliskan kata “pangan”, “televisi”, dan ‘pekerjaan’ dalam tiga kertas metaplan yang berbeda.2. Fasilitator membagikan tiga kertas metaplan ke tiga peserta secara acak. Mintalah satu peserta membacakan dengan keras isi kertas metaplan tersebut.3. Mintalah pandangan dari peserta apakah kata tersebut termasuk hak atau kebutuhan dan alasannya. Tuliskan pandangan-pandangan itu di papan tulis/plano, dalam dua kolom yang berbeda. Satu kolom untuk hak dan satu kolom untuk kebutuhan4. Lakukan langkah yang sama pada dua kertas yang lain.5. Setelah dirasa cukup, fasilitator memandu kelas untuk berdiskusi dan mengidentifikasi perbedaan hak dan kebutuhan. Dalam penjelasan ini, fasilitator juga menghubungkannya dengan konsep pemangku hak (<i>right holder</i>) dan pemegang kewajiban (<i>duty bearer</i>). Penjelasan ini mencakup juga sifat umum kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. |

20 menit Bagian B “....Prinsip-prinsip Pendekatan berbasis hak...”

1. Fasilitator membagikan handout kepada peserta. Mintalah peserta untuk membaca secara cepat isi handout
2. Mintalah peserta menyebutkan prinsip-prinsip pendekatan yang berbasis hak yang ditemui dalam handout. Fasilitator mencatat prinsip-prinsip yang disebutkan di dalam kertas plano. Untuk memastikan pemahaman, mintalah peserta menjelaskan isi dan scope dari masing-masing prinsip tersebut dengan mengacu pada handout yang telah dibagikan.

Catatan Untuk Fasilitator

Pada sesi berikut peserta diharapkan mampu menilai dan menganalisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan berbasis hak. Penilaian dan analisis dilakukan dengan menggunakan studi kasus dalam bentuk film dokumenter.

1. Mulailah dengan menjabarkan konteks dan menunjukkan beberapa contoh kasus yang menunjukkan dikeluarkannya atau dipraktikkannya kebijakan yang tidak berbasis Hak. Lakukan analisis respon berbasis hak, selalu ingatkan peserta bahwa adalah sangat penting untuk menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai fondasi – misalnya kesetaraan, kesamaan, akuntabilitas, pemberdayaan, dan partisipasi – dalam menerapkan pendekatan berbasis hak
2. Tampilkan film dokumenter, pilihlah film yang sederhana dan dapat ditampilkan dalam waktu singkat. Dapat juga memperlihatkan satu keadaan yang lebih kompleks namun dapat di pilah-pilah isunya. Ajaklah peserta untuk mendiskusikan mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan respon berbasis hak. Format berikut dapat digunakan untuk mencatat informasi yang diperoleh dari diskusi serta contoh-contoh yang dipaparkan selama kegiatan berlangsung. Gunakan kertas *flipchart* yang berbeda bagi setiap kolom.
3. Jelaskan lebih jauh bahwa maksud dari latihan ini adalah untuk:
 - Menggunakan HAM sebagai kerangka kerja dalam program pengentasan kemiskinan.
 - Melakukan asesmen terhadap implikasi HAM terhadap berbagai kebijakan, program, maupun perundang-undangan pengentasan kemiskinan.
 - Menjadikan HAM sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan dan program yang berkaitan dengan kemiskinan di segala bidang – termasuk politik, ekonomi, dan sosial

90 menit Bagian C Pemutaran Film dan diskusi dengan narasumber

1. Fasilitator memutar film dokumenter ‘ ...’ tentang penggusuran teluk Gong (film tidak perlu diputar seluruhnya, hanya diambil *footage* mengenai proses penggusurannya saja)
2. Berikan penjelasan singkat kapan dan dimana peristiwa itu terjadi, dan apa alas kebijakan yang dipergunakan. Sebagai penunjang, fasilitator membagikan

teks perda tibum DKI Jakarta, no 8/2007 ke masing-masing kelompok sebagai bahan rujukan kebijakan yang akan diperiksa di dalam kelompok.

3. Setelah menonton pemutaran film ajak peserta diskusi dengan pertanyaan: “apakah dalam kasus penggusuran Teluk Gong dan dikeluarkannya Perda Tibum Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan yang berbasis hak asasi manusia”?
4. Mintalah peserta menyampaikan sikap mereka atas kebijakan tersebut, alasan-alasan yang mendukung sikap mereka, rujukan aturan/ketentuan normatif yang mendukung sikap mereka, dan ketentuan normatif yang menurut mereka bertentangan dengan jaminan perlindungan hak asasi.
5. Ingatkan peserta untuk menilainya dengan mempergunakan prinsip-prinsip pendekatan berbasis hak seperti tertuang dalam *handout*,
6. Setelah selesai diskusi selesai, fasilitator mengelaborasi poin-poin yang muncul dan menghubungkannya dengan perspektif berbasis hak yang telah dilakukan pada *kegiatan 1*
7. Undang narasumber untuk memberikan komentar dan pendalaman berdasarkan hasil kerja continuum yang telah dilakukan
8. Selama narasumber memberikan *feed back*, fasilitator mencatat poin-poin penting yang dirasakan perlu memperoleh penekanan
9. Setelah narasumber selesai memberikan *feedback*, fasilitator memandu proses diskusi dengan narasumber. Apabila dirasakan perlu, fasilitator menekankan kembali poin-poin penting yang diperoleh dan diharapkan dapat didiskusikan dengan lebih dalam.

Catatan Untuk Fasilitator

Pada sesi berikut peserta diharapkan mendapatkan input tambahan dari narasumber yang lebih menyeluruh mengenai pendekatan berbasis hak dan penerapannya dalam penyusunan kebijakan. Pada sesi ini fasilitator hendaknya:

1. Menjelaskan tujuan sesi dan menekankan bahwa pada pemaparan narasumber ini peserta diharapkan mampu menilai dan menganalisis kebijakan dengan menggunakan pendekatan berbasis hak dimana tiap pemangku kepentingan seharusnya secara terus menerus melakukan proses review atas kebijakan publik.
2. Selama sesi berlangsung pastikan narasumber dapat memberikan contoh-contoh *best practices* bagaimana pendekatan ini dapat diimplementasikan sebagai bentuk kajian perbandingan (*comparative lesson*) dari berbagai wilayah di Indonesia (contoh, model yang berjalan di Kabupaten/Kotamadya Surakarta, Pekalongan, Sragen, Kebumen, Kebumen, Jembrana, Kutai, dsb). Fasilitator dapat memberi tambahan input mengenai terobosan-terobosan yang telah diimplementasikan di sejumlah wilayah.
3. Di akhir sesi, fasilitator diharapkan dapat merangkum materi dan memberi penekanan bagaimana melatih kemampuan melakukan identifikasi awal terhadap ketentuan perundang-undangan, budgeting dan proses pembangunan secara umum agar memiliki perspektif hak asasi manusia. Materi ini akan menjadi pengantar dari modul berikutnya (modul 8 tentang penerapan kebijakan berbasis hak dalam fungsi-fungsi legislatif).

Kegiatan 2 Bedah Qanun: Penerapan Fungsi Legislasi berbasis hak asasi manusia

Tujuan

1. Peserta dapat mengidentifikasi prinsip dan elemen kunci pendekatan berbasis hak dalam produk-produk legislasi
2. Peserta mampu menyusun check list sederhana sebagai suatu alat periksa untuk melihat seberapa jauh pendekatan berbasis hak telah dilaksanakan dalam legislasi daerah
3. Peserta mampu mengenali prinsip-prinsip HAM dan bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kandungan Qanun
4. Peserta mampu mengenali elemen-elemen pokok dan kritis dalam penyusunan Qanun
5. Peserta mampu membandingkan elemen-elemen pokok dan kritis dalam penyusunan Qanun dengan prinsip-prinsip HAM

Metode

Diskusi Kelompok (Bekerja dengan kasus/instrumen)
Ceramah narasumber

Waktu

120 menit

Deskripsi

30 menit **Bagian A Diskusi Kelompok**

1. Fasilitator menjelaskan mengenai tujuan kegiatan dan kaitannya dengan modul kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Fasilitator menjelaskan secara singkat bagaimana mengenali prinsip-prinsip HAM dalam Qanun dan berlatih mengenali prinsip-prinsip HAM dalam Qanun serta mengenali kandungan-kandungan qanun yang sesuai/ tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM
2. Bagilah peserta dalam kelompok-kelompok, satu kelompok setidaknya beranggotakan 4 orang. Mintalah masing-masing kelompok melihat kembali hasil kerja kegiatan A, khususnya yang dalam kolom masalah dan dampak. Setelah itu, mintalah masing-masing kelompok untuk menyusun daftar periksa yang paling sederhana dan singkat yang dapat membantu mencegah terjadinya masalah/ mengingatkan kemungkinan adanya masalah tersebut.

Sebagai contoh:

Dalam kolom masalah fungsi legislasi dituliskan “produk legislasi DPR banyak bertentangan dengan hak asasi”; dalam kolom checklist misalnya dituliskan “Apakah RUU yang dibahas sudah sesuai dengan nilai-nilai hak asasi?” UU apa saja yang telah menjadi rujukan?”

90 menit **Bagian B Diskusi Kelas dan Ceramah Narasumber**

1. Fasilitator mengundang kelompok untuk memaparkan hasil kerja kelompoknya.
2. Fasilitator mengundang peserta untuk memberi komentar/masukan
3. Fasilitator mengundang narasumber untuk memberi masukan dan memperkuat pemahaman mengenai penyusunan Qanun berbasis HAM
4. Peserta atau anggota kelompok dapat melakukan tanya jawab dengan narasumber

Kegiatan 3 Bedah kasus penerapan fungsi penganggaran berbasis hak asasi manusia

Tujuan

1. Peserta mampu mengenali elemen-elemen pokok dan kritis dalam penganggaran daerah
2. Peserta mampu mengenali Prinsip-prinsip HAM dan bagaimana mengintegrasikan dan mengaitkannya dengan penganggaran daerah
3. Peserta mampu memahami proses perencanaan anggaran yang terbuka, akuntabel, dan berkomitmen terhadap pemajuan dan perlindungan HAM

Metode

Diskusi Kelompok (Bedah Kasus)
Ceramah Narasumber

Waktu

120 menit

Deskripsi

30 menit **Bagian A Diskusi Kelompok**

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan kaitannya dengan sesi-sesi sebelumnya.
2. Peserta bekerja dalam kelompok dan fasilitator membagikan lembar kerja: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NAD untuk menjadi bahan praktikum. Peserta diminta mengidentifikasi:

- Elemen-elemen pokok Penganggaran daerah
- Elemen-elemen kritis penganggaran daerah
- Kesesuaian elemen-elemen penganggaran daerah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia

90 menit Bagian B Diskusi Kelompok dan Ceramah Narasumber

3. Peserta diminta mempresentasikan hasil kerja kelompok.
4. Fasilitator dan sesama peserta dapat memberikan input / masukan berkaitan dengan hasil kerja kelompok.
5. Fasilitator mengundang narasumber untuk memberi masukan dan memperkuat pemahaman mengenai penyusunan Qanun berbasis HAM
6. Peserta atau anggota kelompok dapat melakukan tanya jawab dengan narasumber

Kegiatan 4 Simulasi Penerapan Fungsi Pengawasan berbasis hak asasi manusia

Tujuan

1. Peserta mampu mengenali elemen-elemen pokok dan kritis dalam penerapan fungsi pengawasan
2. Peserta mampu mengenali Prinsip-prinsip HAM dan bagaimana mengintegrasikannya dengan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah dan penerapan tata pemerintahan yang baik.
3. Peserta mengetahui bagaimana melakukan pengawasan kinerja pemerintah berbasis hak asasi manusia

Waktu

120 menit

Deskripsi

1. Fasilitator menjelaskan tujuan kegiatan dan kaitannya dengan kegiatan sebelumnya
2. Peserta bekerja dalam kelompok dan fasilitator membagikan lembar kerja simulasi untuk dengar pendapat menggunakan hasil kerja praktikum 1 dan 2. Bagi peserta dalam kelompok :
 - i. Kelompok Anggota Dewan
 - ii. Kelompok Warga Masyarakat
 - iii. Kelompok Eksekutif

3. Beri kesempatan bagi peserta untuk mempelajari dan mempersiapkan simulasi sekitar 10 menit.
4. Peserta diminta menampilkan simulasinya selama kurang lebih 20 menit
5. Lakukan refleksi dari hasil simulasi tersebut
6. Fasilitator dan sesama peserta dapat memberikan input / masukan berkaitan dengan hasil simulasi

Debriefing / Evaluasi

Tujuan

1. Peserta memahami tujuan modul 2
2. Peserta mampu merefleksikan proses yang dilakukan dalam modul 2 dalam pekerjaan sehari-hari

Waktu

10 menit

Deskripsi

- 15 menit** Setelah menyelesaikan Modul 2, diskusikan manfaat apa saja yang diperoleh dari modul tersebut. Pertanyaan untuk dipertimbangkan:
1. Masalah-masalah apa yang telah dibahas yang paling relevan dengan pekerjaan sehari-hari di dalam lembaga?
 2. Apa perbedaan dari berbagai metode dan teknik pendidikan HAM yang telah digunakan? Apakah metode dan teknik tersebut efektif?
 3. Bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut dapat diadaptasikan dalam tugas-tugas keseharian?

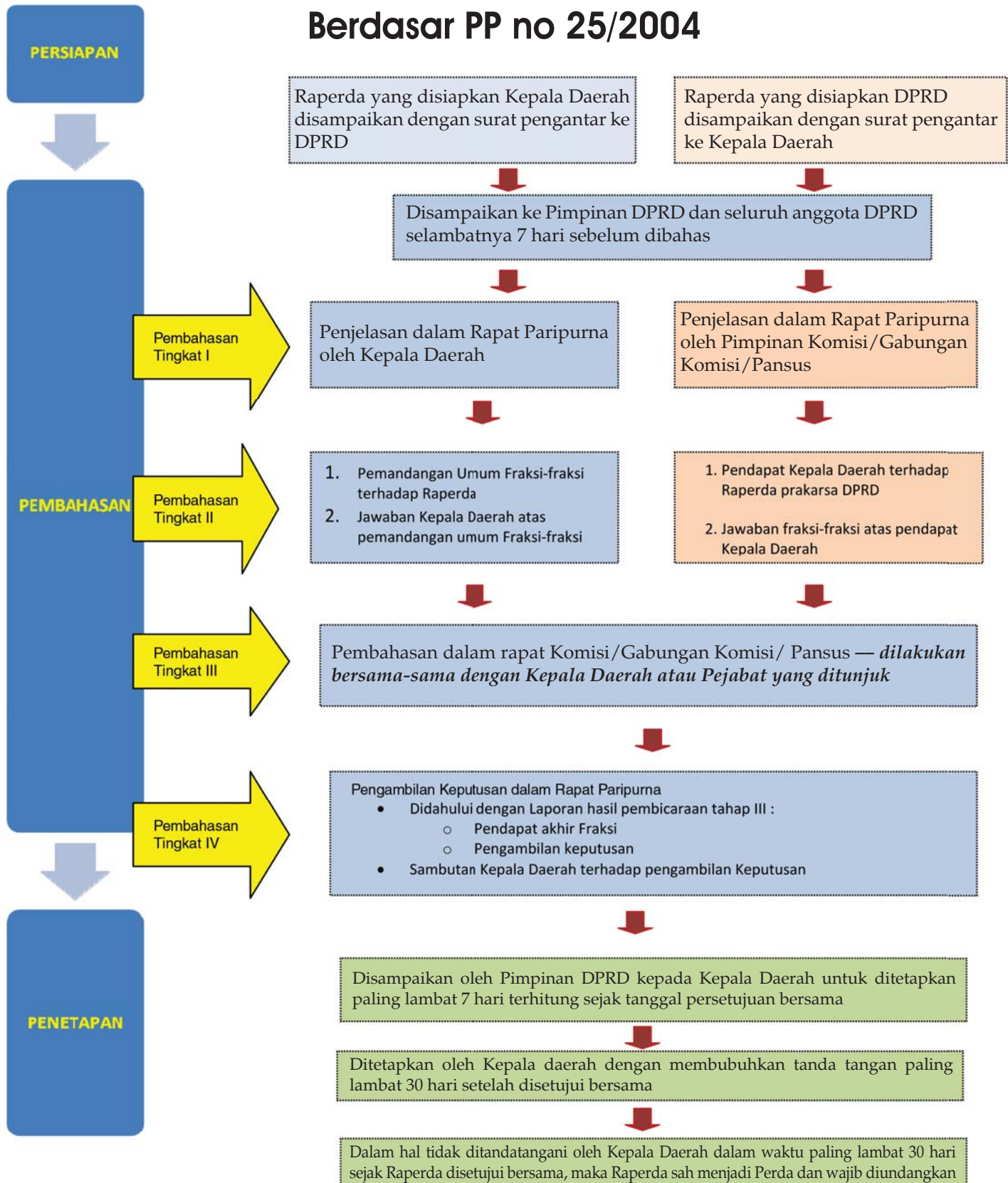
Lembar Kerja

Penyusunan *Cheklis* pendekatan berbasis HAM dalam pelaksanaan fungsi DPRD

TAHAP	MASALAH	DAFTAR PERIKSA	KETERANGAN
PERSIAPAN			
PENYUSUNAN	<i>contoh ‘.. rumusan bertentangan dengan ham ..’</i>	<i>contoh ‘.. Apakah rumusan pasal-pasal telah sesuai dengan kerangka normatif perlindungan HAM yang berlaku? Apa saja kerangka normatif HAM yang terkait?’</i>	
Paska Penetapan/ implementasi			

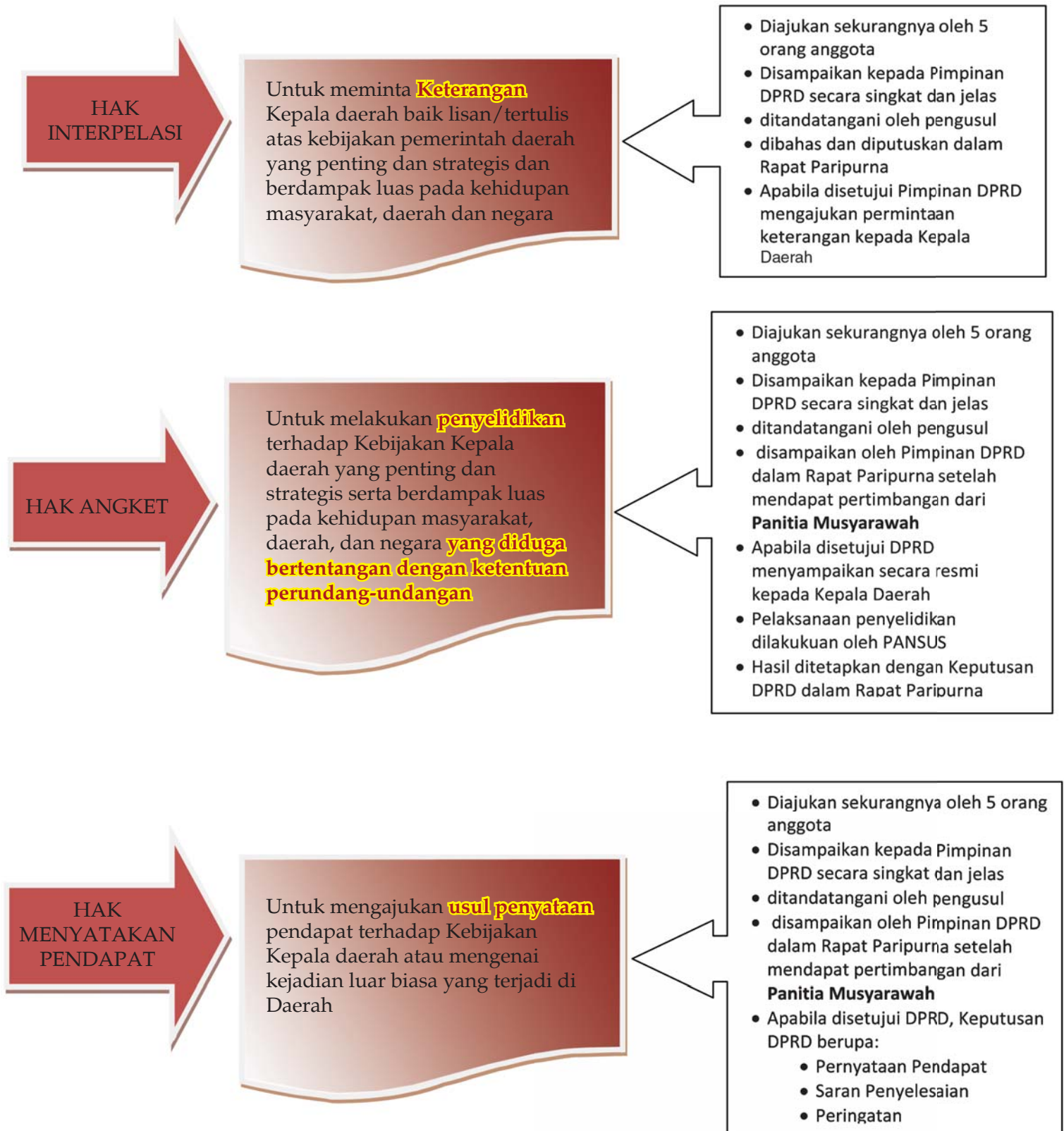
Lembar Rujukan :

Prosedur Pembentukan Perda Berdasar PP no 25/2004



Lembar Rujukan

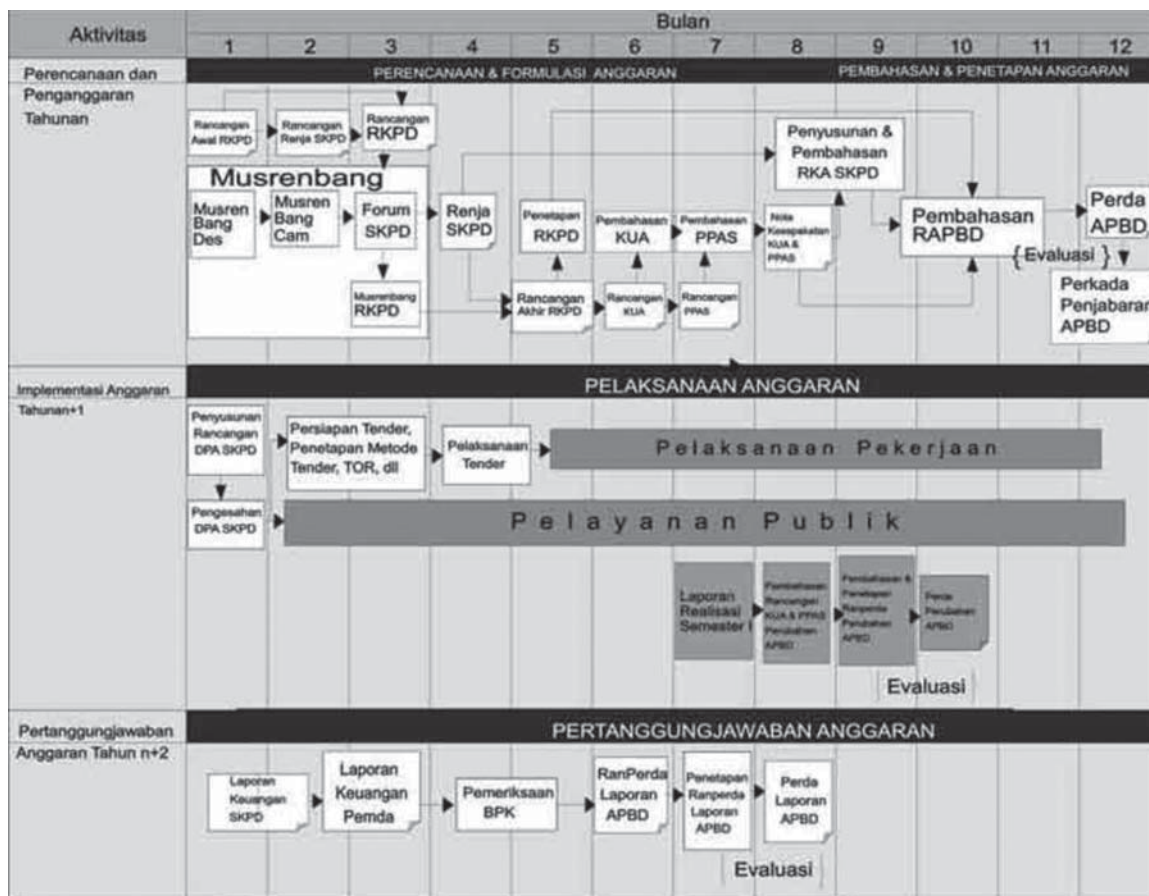
Mekanisme Pengawasan Oleh DPRD



Lembar Rujukan

Siklus Penganggaran daerah

<http://www.budget-info.com/web/id/ensiklopedia/siklus-anggaran>



Lembar Rujukan

Sumber: LBB 5-2, LGSP, menjadikan wakil rakyat semakin bermartabat: Panduan Fasilitator Orientasi bagi anggota DPRD, hal 69 - 71

Penormaan dalam Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Problematika perundang-undangan yang sangat mendasar dewasa ini adalah perumusan norma dalam perundang-undangan itu sendiri. Keterampilan hukum berupa kemampuan yang sifatnya keahlian merancang masih belum tersosialisasi diantara para pemerhati hukum. Pendidikan hukum sendiri, lebih memberi bobot kepada keterampilan menerapkan hukum untuk memenuhi tuntutan pasar praktek hukum. Senyampang melakukan asistensi proses legislasi daerah, tulisan singkat ini dikontribusikan untuk memberi pencerahan bagi praktisi *legal drafting* agar selalu memberi perhatian pada persoalan penormaan dalam aturan hukum.

MEMBEDAKAN ATURAN DAN NORMA HUKUM

Bagian yang sangat strategis dalam tahapan penyusunan perundang-undangan, apakah itu perundangundangan di pusat (Undang-Undang) ataukah di daerah (Peraturan Daerah/Perda), adalah mengisi rumusan dengan pilihan norma atau pedoman tingkah laku yang tepat dan proporsional. Penyusun peraturan daerah harus dapat membedakan pengertian **aturan dengan norma**. *Bruggink*, memberikan istilah yang lebih tegas, yaitu **aturan dan kaidah hukum**.

Aturan merupakan bentuk formal dari produk hukum. Terminologi umum yang digunakan untuk mengatakan aturan adalah *rules*. *Rules* dan aturan memiliki kesamaan juga perbedaan makna. Kata aturan selalu memiliki makna tertulis. Misalnya disebut **melanggar aturan**, berbeda dengan kata **melanggar hukum**. Melanggar aturan berarti melanggar hukum yang tertulis (*written rules*), sedangkan melanggar hukum dapat dimaknai hukum yang tertulis (aturan/rules) dan hukum yang tidak tertulis (kebiasaan/*unwritten rules*).

Ciri lain dari aturan selain bentuk adalah herarkhi/tingkatan. Perlu dipahami penggunaan kata tingkatan dengan jenjang berbeda makna. Kata **tingkat** akan menunjuk pada posisi yang tertinggi berbeda dengan kata **jenjang**. Misalnya gedungnya tingkat berapa? maka akan dijawab tingkat 5 (yang tertinggi dulu). Berbeda dengan kata “jenjang” kepangkatan, maka akan dimulai dengan menyebut jenjang terendah menuju yang lebih tinggi, hingga sampai puncaknya. Herarkhi adalah konsekuensi logis dari kedudukan hukum (legal position) lembaga pembentuk dibandingkan lembaga lainnya.

Berdasar ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, hierarkhi perundang-undangan dalam sistem aturan di Indonesia dirinci sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
- b. Undang-undang (UU)-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)

Penjelasannya, bahwa keberadaan perundang-undangan yang lebih rendah bersumber dari perundangundangan yang lebih tinggi. Dalam implementasinya, materi muatan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Praktik ketatanegaraan yang merefleksi pada pemikiran “*stufen theory*” ini dapat dilihat dalam sistem pengujian perundang-undangan di Indonesia. Pengujian perundang-undangan tersebut dibedakan dalam dua kelompok pengujian, yaitu pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Sementara itu, pengujian perundang-undangan di bawah Undang-Undang (peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah) terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung (UU Nomor No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

PERUMUSAN NORMA (BAHASA PENORMAAN)

Tahapan yang sangat krusial dalam drafting adalah penggunaan bahasa dalam perumusan norma. Seperti telah dijelaskan, jenis norma yang selalu ada dalam perundang-undangan adalah norma kewenangan (*bevoegdheidsnormen*) dan norma perilaku (*gedraagsnormen*). Perumusan norma kewenangan dimulai dengan penetapan siapa yang berwenang dan apa kewenangan yang diberikan. Apabila dimungkinkan pendelegasian atau pengaturan lebih lanjut, maka dirumuskan secara tegas kepada siapa wewenang itu di delegasikan atau dalam bentuk apa pengaturan lanjutannya.

Contoh 1: (delegasi pelaksanaan)

- 1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Jabatan Kepala Sekolah Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- 3) Kepala Dinas Pendidikan wajib membuat laporan tertulis kepada Bupati.

Contoh 2: (delegasi pengaturan)

- 1) Bupati berwenang menetapkan standar pelayanan pendidikan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pendidikan dasar di Kabupaten.
- 2) Penetapan standar pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Contoh 3: (delegasi pengaturan)

- 1) Bupati berwenang menetapkan besaran subsidi pendidikan yang dapat diterima oleh sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan dasar.
- 2) Jumlah besaran dan kriteria sekolah yang dapat menerima subsidi pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Contoh 4: (wewenang perizinan)

- 1) Bupati berwenang menerbitkan izin kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar
- 2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan

PERUMUSAN SANKSI

Dalam rangka efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah diperlukan rumusan tentang sanksi sebagai instrumen penegakan hukum. Dalam drafting, diberikan pilihan instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum lingkungan. Sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Perda seyogyanya cukup mencantumkan sanksi administrasi. Artinya, peraturan daerah hanya berkaitan dengan urusan pemerintahan, tidak mengkriminalkan orang. Pilihan sanksi administrasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan oleh RO. Sedangkan LIA bertugas untuk menegakkan agar pelanggaran segera diakhiri. Jenis sanksi administrasi meliputi:

- peringatan lisan
- peringatan tertulis
- denda administrasi
- penutupan sementara tempat kegiatan
- pencabutan surat keputusan (izin)

Pola perumusan sanksi administrasi ini, dilakukan dengan cara menyebutkan secara rinci apa jenis pelanggaran, apa jenis sanksi dan siapa yang berwenang menetapkan sanksi. Dalam hal merumuskan sanksi pidana, harus didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 166 UU 32 Tahun 2004 yang memberikan batasan sebagai berikut:

- pidana kurungan paling lama 6 bulan; atau
- pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).

PEMBIAYAAN.

Bagian lain yang sering terabaikan dalam perumusan peraturan daerah adalah menetapkan pembiayaan yang ada di dalam batang tubuh peraturan daerah. Ketentuan tentang pembiayaan ditempatkan sebelum rumusan tentang penegakan hukum/sanksi. Rumusan tentang pembiayaan sekurang-kurangnya meliputi:

- pembiayaan sosialisasi;
- pembiayaan pelaksanaan Perda, misal penyediaan anggaran Pendidikan dalam APBD minimal 20% di luar anggaran belanja pegawai; dan
- pembiayaan pengawasan dan penegakan hukum

PENUTUP

Dalam mekanisme perumusan norma perilaku, hal yang penting diperhatikan oleh drafter/ perancang adalah membuat catatan tentang pasal dan ayat yang mengatur tentang larangan, perintah dan izin. Ketiga jenis norma perilaku ini membawa konsekwensi dirumuskannya ketentuan tentang sanksi, baik pidana maupun administrasi. Pilihan yang tepat dan proporsional dalam memilih jenis sanksi yang diterapkan pada ketiga jenis norma perilaku tersebut akan membawa dampak efektivitas dalam implementasinya

Lembar Rujukan

Qanun dan Kaitannya dengan Hak Sipil dan Hak Ekosob

Kedudukan Qanun dalam Perundang-undangan, seringkali ada kesalahpahaman bahwa qanun bisa mengatur apa saja yang dirasakan perlu diatur. Hal ini disebabkan adanya Pasal 270 UU No. 11 Tahun 2006 yang mengatakan mengenai peraturan yang mengatur pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006, yaitu:

Untuk pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 yang menyangkut kewenangan Pemerintah diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan; untuk kewenangan Pemerintah Aceh diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh; kewenangan Pemerintah kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten/kota.

Dalam kerangka besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikenal adanya jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

UUD 1945

Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah (Perda)

Tata urutan ini penting untuk mengetahui isi atau materi muatan setiap jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dikatakan hierarki karena prinsipnya yang berada paling atas adalah yang mendasari peraturan di bawahnya. Urutan inilah yang menentukan apa yang boleh diatur oleh jenis peraturan tertentu.

Qanun dipersamakan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004. Qanun, dikatakan dalam penjelasan tersebut, termasuk dalam jenis Peraturan Daerah.

Pasal 12 UU No. 10 Tahun 2004 mengatur dengan jelas materi muatan peraturan daerah yaitu seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5 Qanun Aceh No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun menjelaskan bahwa materi muatan Qanun meliputi:

1. pengaturan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh;
2. pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa;

3. pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
4. penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan

Qanun pada dasarnya bisa mengatur berbagai hal mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, namun tentunya dengan koridor tertentu, yaitu:

1. sesuai dengan kewenangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2006
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum
3. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
4. tidak bertentangan dengan qanun lain.

Qanun Aceh:

- berlaku di wilayah Pemerintahan Aceh (dalam istilah yang lama: provinsi atau daerah tingkat I)
- dibentuk oleh Pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
- mengatur kewenangan Pemerintahan Aceh

Qanun Kabupaten/Kota:

- berlaku di wilayah Kabupaten/Kota (dalam istilah yang lama: daerah tingkat II)
- dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK)
- mengatur kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Peran Qanun dalam Perubahan Sosial

Qanun, dengan karakternya sebagai sebuah produk hukum, diharapkan mampu berperan sebagai pendorong lahirnya perubahan sosial. Hukum mengatur banyak hal. Setiap orang maupun badan yang diatur di dalamnya wajib melakukan hal yang diperintahkan. Sebaliknya, mereka dilarang melakukan hal-hal tertentu yang diatur oleh hukum.

Karena kekuatan tersebut, hukum bisa digunakan untuk **perubahan sosial**. Masyarakat dipaksa oleh hukum untuk melakukan perbuatan tertentu dan tidak melakukan perbuatan tertentu. Akibatnya, terbentuk perilaku-perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Perilaku-perilaku ini bila terjadi dalam suatu masyarakat secara keseluruhan, dalam jangka panjang, akan menyebabkan suatu perubahan sosial.

Sebagai contoh, dulu secara umum ada pandangan mengenai “banyak anak banyak rejeki”. Pemerintah kemudian mengenalkan konsep keluarga berencana melalui pelbagai peraturan. Dalam beberapa dasawarsa, program ini mulai kelihatan pengaruhnya. Pandangan masyarakat mengenai keluarga besar berhasil diubah secara perlahan. Meski demikian, tidak bisa kita lupakan beberapa catatan kritis mengenai pelaksanaan program ini. Di beberapa tempat, pelaksanaannya telah dilakukan dengan melanggar hak-hak asasi perempuan.

Kaitannya dengan hak sipol dan hak ekosob, keberadaan qanun diharapkan mampu memberikan respon (tanggapan) kepada masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai kendala atau hambatan dalam pemenuhan kedua hak tersebut.

DAFTAR PENILAIAN RANCANGAN QANUN
Berdasarkan Parameter Hak Sipil dan Hak Ekosob

Rancangan (1)	Masalah Sosial (2)	

Rancangan (1)	Masalah Sosial (2)	Pilihan (3)	Tingkat Kesesuaian, Peluang Implementasi, dan Faktor yang Mempengaruhi (4)			
			Hak Sipil (4.1)	Hak Politik (4.2)	Hak	Hak Budaya (4.5)

Keterangan:

Rancangan qanun yang akan diperiksa berjumlah 1 (satu) qanun sebagai contoh dan mencakup salah satu dari 4 (empat) bidang antara lain SDA, pertahanan, tata ruang, dan bantuan hukum. Pilihan di luar empat bidang tersebut sangat dimungkinkan apabila bahan belajar berupa (rancangan) qanun atau qanun yang terkait dengan empat bidang tersebut tidak tersedia. Model pengisian kolom (2), kolom (3), dan kolom (4) berupa naratif atau pointer bersifat analisis informatif.

DAFTAR PERIKSA QANUN
 Berdasarkan Parameter HAM dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Rancangan Qanun (1)	Tingkat Kesesuaian dengan Pasal 227 da (2)								
		Tingkat Kemiskinan (3.1)	Sanitasi (3.2)	Potensi Bencana Alam (3.3)	Perang atau Konflik Bersenjata (3.4)	Tingkat Korupsi (3.5)	Penjajahan (3.6)	Radikalisme (3.7)	Rezim Pemerintahan (3.8)

Keterangan:

Form Daftar Periksa ditujukan kepada proses penilaian rancangan qanun. Namun tidak tertutup kemungkinan diberlakukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) qanun yang telah berlaku.

Rancangan qanun yang akan diperiksa berjumlah 1 (satu) qanun sebagai contoh dan mencakup salah satu dari 4 (empat) bidang antara lain penanaman modal, pelayanan publik, pemilihan umum, dan pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Pilihan di luar empat bidang tersebut sangat dimungkinkan apabila bahan belajar berupa (rancangan) qanun atau qanun yang terkait dengan empat bidang tersebut tidak tersedia.

Identifikasi kendala implementasi dan faktor yang berpengaruh masih dimungkinkan untuk ditambah dengan faktor-faktor yang lain. Model pengisian kolom (2) dan kolom (3) berupa naratif atau pointer bersifat analisis informatif.

Lembar Rujukan

Perubahan dari Kebutuhan menjadi Hak

(Dikutip dari : 2007, *International Human Rights Training Programs, Equitas*)

Pendekatan Berbasis Hak – *Rights-based Approach* (RBA):

- Didasari oleh pemahaman bahwa setiap manusia, dengan moralitas yang tinggi sebagai manusia, adalah pemegang hak.
- Mengasumsikan bahwa seluruh manusia, termasuk anak-anak, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi yang mereka miliki.
- Melibatkan sebuah proses pemberdayaan bagi mereka yang belum menikmati hak yang mereka miliki, untuk menuntut hak tersebut. Pendekatan ini tidak melibatkan kegiatan amal atau pembangunan ekonomi sederhana.
- Mengintegrasikan norma, standard, serta prinsip sistem HAM internasional pada rencana, kebijakan, dan proses program pembangunan, program sosial, serta program lainnya.
- Mendukung konsep bahwa setiap orang – tanpa membedakan masalah umur, gender, ras, agama, latar belakang etnis, status sosial, atau perbedaan lainnya – memiliki hak dasar untuk hidup secara bermartabat dan terhormat.
- Menjamin bahwa setiap program yang dikembangkan menyentuh seluruh aspek dalam kehidupan manusia (misalnya dengan menjamin keberlangsungan hidup melalui pemenuhan kebutuhan psikologis). Keseluruhan aspek tersebut merupakan kesatuan inklusif dan holistik.
- Menekankan pada prinsip kesetaraan dan kesamaan, akuntabilitas, pemberdayaan, dan partisipasi.

Elemen kunci pendekatan berbasis hak dapat dijadikan panduan bagi materi dan praktik kerja anda. Analisis situasional HAM harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi yang telah ada. Elemen kunci tersebut, adalah:

1. Partisipasi

- Bertujuan untuk mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat, komunitas, kelompok masyarakat adat, perempuan, anak-anak dan lain-lain.
- Memandang remaja dan anak-anak sebagai peserta aktif dalam segala bentuk kegiatan pencarian solusi konstruktif.

2. Meningkatkan Akuntabilitas

- Mengidentifikasi pemegang hak – *rights holders* (beserta hak-hak yang dimilikinya) serta pemenuh kewajiban – *duty bearers* (beserta kewajibannya).
- Mengidentifikasi kewajiban positif para *duty bearers* (untuk melindungi, mempromosikan, dan memenuhi hak) serta kewajiban negatifnya (untuk tidak melakukan pelanggaran hak).

3. Non diskriminasi

- Memberikan perhatian khusus pada diskriminasi, kesetaraan, kesamaan, serta kelompok marjinal – termasuk kelompok minoritas, kelompok masyarakat adat, serta warga negara yang ditahan dan atau sedang menjalani proses hukum. Pendekatan berbasis hak mensyaratkan bahwa pertanyaan mengenai siapa kelompok yang termarginalkan disesuaikan dengan kondisi setempat.

4. Berpindah dari ketergantungan menjadi Pemberdayaan

- Memfokuskan pada kelompok penerima bantuan – *beneficiaries* – sebagai pemilik hak serta pelaku pembangunan, dan bukan hanya sebatas objek dari program dan tindakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka.
- Memberikan kekuasaan, kapabilitas, dan akses kepada masyarakat yang dibutuhkan untuk merubah hidup, memperbaiki kondisi, serta mempengaruhi masa depan mereka. Memberikan penekanan lebih pada penguatan individu dan komunitas – termasuk anak-anak – untuk berperan lebih aktif di dalam masyarakat.

5. Menunjukkan hak-hak yang dimiliki individu secara langsung

- Membangun jaringan yang dapat langsung menghubungkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai instrumen HAM di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- Mempertimbangkan keseluruhan hak – seperti hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial – secara terpadu, saling terkait dan saling berhubungan.

Rujukan dan Bacaan Lebih Lanjut

1. UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
2. UU no 10 tahun 2004 tentang tata cara pembentukan Undang-Undang
3. PP no 25 tahun 2004 tentang Pedoman penyusunan Tata Tertib Daerah
4. Qanun no 3 tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan Qanun
5. Ringkasan Eksekutif Penelitian Desentralisasi Yappikka, 2006, hal 20 -25
6. Indikator Good Publik Governance: Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik, Bappenas, 2007
7. Handbook Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Bappenas, 2006-2009
8. Menjadikan Wakil Rakyat semakin bermartabat: Panduan Fasilitator Orientasi bagi anggota DPRD, LGSP, 2009
9. Qanun-qanun yang relevan untuk didiskusikan:
 - a. Qanun Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Qanun Pertanahan
 - c. Qanun Tata Ruang
 - d. Qanun Bantuan Hukum

Jumlah qanun diperkirakan sampai dengan 4-5 qanun, dengan materi qanun yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

10. Daftar Undang-Undang yang relevan
 - UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)
 - Keppres No. 36 Tahun 1990 Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)
 - UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
 - UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
 - UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
 - UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
 - UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 11. HAM sebagai Parameter Pembangunan, ELSAM, 1997
- 12. Hak Asasi Manusia dan Hukum, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004
- 13. Suara HAM Sebuah Bunga Rampai, PUSHAM Universitas Surabaya, 2005
- 14. Tak Ada Hak Asasi yang Diberi, YLBHI, 2005
- 15. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan, Komnas HAM, 2007
- 16. Merancang Qanun, Merancang Pembaruan Aceh, ADF-IMPACT Aceh-PSHK, 2007
- 17. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Tim Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008
- 18. Wacana Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PUSHAM Universitas Surabaya, 2008
- 19. Kirkemann Boeson, J., Martin, T., *Applying a Rights –Based Approach: An Inspirational Guide for Civil Society*, www.human rights.dk, 2007: p.10-11
- 20. UNICEF Canada, *Children’s Rights, CIDA, Continuous Learning Human Resources*, December 2001.
- 21. UNESCO, *The Human Rights Based Approach and the United Nations System: Desk Study prepared by André Frankovits*, UNESCO 2006:p54
- 22. World Health Organization, *25 Questions & Answers on Health & Human Rights*, Health & Human Rights Publication Series, Issue No. 1, July 2002.
- 23. Rios-Kohn, Rebecca, *A Review of a UNICEF Country Programme, Based on Human Rights: The Case of Peru*, UNICEF, November 2001.
- 24. Institute for Child Rights & Interagency Coalition on AIDS and Development, *Filling the Gaps: Using a Rights-based Approach to Address HIV/AIDS and its Affects on South African Children, Youth and Families, Care and Support Guidelines*, 2001.
- 25. UNHCR website, <http://www.unhchr.ch/development/approaches-04.html>

Evaluasi dan Penutup

Pengantar

Bagian penutup ini berisikan kegiatan evaluasi dan penutupan. Di dalamnya akan menjelaskan bagaimana sesi penutupan akan diproses melalui sebuah evaluasi keseluruhan yang akan dilakukan secara tertulis dan lisan. Peserta dan penyelenggara akan memiliki kesempatan bersama-sama membuat catatan perbaikan agar hal-hal yang baik dapat dipertahankan dan dilanjutkan kembali, sedangkan hal-hal yang perlu diperbaiki dapat dijadikan sebagai sarana refleksi dan pembelajaran untuk tidak terulang lagi.

Sesi ini juga penting karena memberi kesempatan kepada penyelenggara untuk menjelaskan arti penting tindak lanjut dari program ini dan membekali peserta untuk dapat kembali ke organisasi masing-masing dengan membawa keterampilan dan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengintegrasikan pendekatan berbasis hak bagi pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif.

Pada kegiatan evaluasi peserta dan fasilitator bersama-sama akan melakukan Penilaian tentang pencapaian tujuan, materi, proses dan metode; Penilaian tentang Narasumber, Fasilitator, panitia, dan sesama peserta; serta Penilaian tentang pengorganisasian pelatihan, logistik, bahan yang dibagikan. Setelah itu kegiatan akan ditutup oleh penyelenggara dengan harapan-harapan ke depan, Ucapan terima kasih, dan permohonan maaf

Tujuan Modul

1. Peserta, fasilitator, dan panitia dapat mengenali capaian pelatihan dan hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan
2. Penyelenggara dan panitia dapat menyelesaikan dan menutup pelatihan

Kegiatan:

- | | | | |
|----|------------|----------|----------|
| 1. | Kegiatan 1 | Evaluasi | 30 menit |
| 2. | Kegiatan 2 | Penutup | 15 menit |

Bahan belajar

Lembar Evaluasi

LEMBAR EVALUASI

1. Nama Pilihan

Bagian A – Keseluruhan Pelatihan – Isi dan Proses

Sasaran	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat Setuju
a. Meningkatnya kesadaran kita tentang HAM dan peran legislatif sebagai pemangku kewajiban dalam pemajuan dan perlindungan HAM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Meningkatnya kemampuan kita tentang bagaimana mengintegrasikan HAM dalam fungsi-fungsi legislatif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Kegiatan Pelatihan

	Tidak	Sebagian	Ya
a. Apakah kegiatan-kegiatan ini efektif dalam mendorong para peserta untuk saling berbagi pengalaman?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentar:			

b. Apakah kegiatan-kegiatan efektif dalam memadukan praktik dan teori?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentar:			
c. Apakah jumlah waktu yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selama pelatihan memadai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentar:			
d. Apakah perpaduan antara presentasi dan kerja kelompok besar dan kecil sesuai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentar:			
e. Apakah ada kesempatan yang cukup untuk menggali jaringan kerja antar peserta?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komentar:			

3. Buku Panduan Pelatihan				
	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
a. Mutu buku panduan secara umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Potensi kegunaannya dalam pekerjaan saya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Kejelasan instruksinya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Komentari:				
4. Fasilitator				
	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
a. Kemampuan untuk menerangkan secara jelas dan merangkum diskusi.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Kemampuan untuk mendorong partisipasi anggota kelompok selama kegiatan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Kemampuan untuk menjelaskan hubungan di antara kegiatan yang berbeda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

d. Komentar:				
5. Nara Sumber				
Komentar umum tentang nara sumber:				
6. Logistik				
	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
a. Akomodasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Ruang pertemuan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Mutu makanan dan pelayanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Bantuan dari petugas hotel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. Penyebarluasan informasi sebelum pelatihan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f. Komentar				

Bagian D – Komentar Umum				
		Tidak	Sebagian	Ya
a. Apakah pelatihan ini seperti yang anda harapkan?		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harap Jelaskan:				
b. Aspek apa dari pelatihan ini yang anda anggap paling berguna?				
c. Aspek apa dari pelatihan ini yang anda anggap paling tidak berguna?				
d. Apa isi pelatihan yang anda rekomendasikan jika kami mengadakan pelatihan di masa yang akan datang?				
e. Apakah anda telah mengubah persepsi/ide-ide anda sebagai hasil dari kegiatan dan diskusi selama pelatihan?				
Ya () Tidak ()				
Mohon jelaskan jawaban anda:				

Tentang DEMOS

Organisasi ini berawal pada tahun 1997 ketika Institut Studi Arus Informasi (ISAI) bekerja sama dengan SAREC (*Swedish Agency for Research Cooperation*) melakukan riset mengenai gerakan demokrasi di Indonesia dengan supervisi Profesor Olle Tornquist (*Oslo University*) dan Profesor Arief Budiman (*Melbourne University*) yang kemudian berlanjut menjadi riset mengenai kapasitas aktor demokrasi. Semakin besarnya skala kegiatan menghasilkan keputusan pada akhir tahun 2002 agar riset ISAI-SAREC ini segera dipisahkan dari kelembagaan ISAI yang lebih banyak berkonsentrasi di bidang media, dan membangun sebuah lembaga kajian yang kemudian bernama Demos. Saat ini, ada tiga lembaga utama penopang Demos yaitu ISAI, KONTRAS, INTERFIDEI. Sebagai lembaga, Demos merupakan sebuah perkumpulan individu dengan anggota antara lain Th. Sumartana (alm), Nasikun, Arief Budiman, Asmara Nababan (alm), Munir (alm), Maria Hartiningsih, AE Priyono, Anton Pradjasto, Stanley, Emanuel Lalang.

Visi

Terwujudnya masyarakat dan negara yang menghormati nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemajemukan dan kesetaraan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Misi

Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia melalui praktek diskursus; diseminasi dan mendorong pengembangan jaringan kerjasama.

Rumusan Program

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Demos memilih tiga isu strategis yang kemudian menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kerja Demos yaitu:

Demos bersama-sama dengan aktor pro-demokrasi melakukan pengkajian tema-tema strategis bagi pengembangan demokrasi dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.

Demos memfasilitasi usaha peningkatan peran, kapasitas aktor dan institusi pro-demokrasi untuk memperkuat representasi masyarakat, terutama di tingkat lokal.

Menjalankan Demos sebagai sebuah lembaga yang kapabel, akuntabel, transparan, partisipatif dan berkelanjutan.

Notes

[illegible]